



Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, MA

AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PANCASILA



Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG



AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PANCASILA

LAPORAN HASIL PENELITIAN KOMPETITIF

Oleh :

Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, M.A

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2017**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM
DALAM PANCASILA

Penulis : Dr. H. Bukhori Abdu Shomad, M.A

Cetakan : 2017

Pertama

Desain Cover : Team

Layout oleh : Nurdermawan

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang nilai-nilai kepemimpinan Islam yang tertera dalam Pancasila. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa; *Pertama*, menjadi seorang pemimpin harus mempunyai keseimbangan tiga kecerdasan yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. *Kedua*, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan pesan-pesan Al-Qur'an dan hadits maka haruslah paling tidak ada empat kata yang harus menjadi perhatian kita kalau membicarakan *good and clean governance*, yaitu (1) *good government*, (2) *clean government*, (3) *good governance*, dan (4) *clean governance*. Dari empat pembagian tersebut dilihat bahwa yang menjadi perhatian adalah *good* (baik), *clean* (bersih), *government* (pemerintahan), dan *governance* (penyelenggara pemerintahan). Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih hal ini sesuai dengan tujuan bernegara dalam Islam yakni *baladun tayyibatun warabbun ghafur*. *Ketiga*, jika mengkaitkan dengan sistem pemerintahan yang menjadikan Pancasila sebagai idiologi negara, maka ajaran agama Islam tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Karena nilai-nilai Islam sedemikian kohesif dan terserap dalam ideologi Pancasila. Seperti; Ketuhanan yang Maha Esa (QS. Al Ikhlas: 1), Kemanusiaan (QS. Al Insaan: 8-9), Nasionalisme (QS. Al Hujurat: 13), Demokrasi Musyawarah (QS. As Syuro: 38), dan Keadilan Sosial (Adz Dzaariyaay: 19). Islam telah menjadi "spirit" Pancasila. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama.

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	9
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian	13
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM KEPEMIMPINAN ISLAM DAN PANCASILA	19
A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan.....	19
B. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam.....	34
C. Kepemimpinan Karakter Pancasila	55
D. Sejarah dan Sosial Politik Pemimpin Islam Dahulu dan Sekarang	67
E. Pancasila	82
F. Islam, Komunis dan Pancasila	107
BAB III AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DALAM AL- QURAN DAN PANCASILA	119
A. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kepemimpinan	119
B. Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Nilai- nilai Pancasila.....	148

BAB IV	AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PANCASILA.....	175
	A. Menyeimbangkan Tiga Kualitas Kecerdasan Dasar Kepemimpinan.....	175
	B. Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih	184
	C. Kontribusi Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Pancasila	192
BAB V	PENUTUP.....	215
	A. Kesimpulan	215
	B. Saran-Saran dan Penutup	217

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang ajaran dasarnya terdapat dalam al-Quran, pada masa awal penampuilannya berkembang sebagai kekuatan sosial. Berbagai problema yang dihadapi Islam dalam bidang politik telah mulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Persoalan-persoalan dalam bidang politik semakin memuncak setelah Nabi wafat. Sejarah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah saw adalah persoalan kekuasaan /kepemimpinan pasca Rasulullah saw. Persoalan kekuasaan politik ini melahirkan pertemuan di tsaqifah banu saidah , pelaksanaan suro yang pertama dilakukan umat islam sejak wafatnya nabi untuk memilih khalifah. Dan peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah, menjadi titik tolak penting bagi sejarah perpolitikan umat Islam. Karena secara aspiratif, umat islam dalam dua peristiwa tersebut mulai berpolarisasi untuk mengorbitkan siapa yang berhak menjadi kholifah. Yang pada perkembangan berikutnya mengakibatkan umat islam terkotak-kotak kedalam berbagai aliran, yaitu: Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Sunni. Sehingga memunculkan fanatisme golongan yang berakar dari ideologi masing-masing. Sementara Islam berbicara tentang nilai-nilai kepemimpinan harus berdasarkan al-Quran. sehingga muncul banyak persepsi dalam penafsiran ayat kepemimpinan. Di sinilah titik mulai terjadi silang pendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan al-Quran sebagai dasar Negara, disisi lain mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak harus formalistik tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai yang diterapkan tidak keluar dari koredor al-Quran. Maka

dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila juga bagian dari yang diperdebatkan tidak pernah usai sampai sekarang. Padahal Pancasila kalau dicermati dari butir-butir sila ke-satu sampai sila ke- lima, mengandung nilai-nilai al-Quran dalam bentuk lain. Dalam Pancasila termaktub pedoman/ aturan nilai-nilai kepemimpinan dalam suatu Pemerintahan yang berketuhanan, bermoral, bersih, efisien, dan efektif, serta rasa tanggung jawab.¹

Maka nilai-nilai kepemimpinan harus berakhlakul karimah, tata susila (kesusilaan) dan tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan berbangsa dan bernegara²

¹Sedarmayanti, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 53. M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik al-Quran* (Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 55-56. Adeng Muchtar Ghazali, *Civil Education* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), h. 36. Lihat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia 2020, yaitu: Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis. Lihat juga: Kata Pengantar Hidayat Nur Wahid: Pendekatan spiritualisme dalam kepemimpinan diri akan banyak memberi warna baru yang menyegarkan dan mengurangi kekeringan spiritualitas yang melanda Masyarakat kontemporer. Ajaran Islam sendiri selalu menekankan bahwa kepemimpinan merupakan amanah luhur yang harus diemban oleh seseorang yang benar-benar mampu menjalankannya. Seorang pemimpin haruslah kredibel, kapabel, *acceptable* dan *accountable*. Dalam buku karya Farid Poniman, Indrawan Nugroho dan Jamil Azzaini, *Kubik Leadership* (Jakarta: Mizan Publika, 2006), h. 27.

²Franz Magnis Suseno, lahir di Jerman 1936, pada tahun 1955 masuk serikat Yesus, sejak tahun 1961 berada di Indonesia. Ia belajar filsafat, teologi dan teori politik di Pullach, Yogyakarta dan Munchen, dan memperoleh gelar Doktor di bidang Filsafat dari Universitas Munchen. Sekarang menjadi pengajar tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, di Universitas Indonesia dan Universitas Parahyangan. Menurut beliau Etika berguna untuk, 1) sebagai norma-norma dasar untuk menentukan apa yang harus dianggap

2

A.W. Widjaja mengatakan bahwa³ kegagalan dan kemerosotan wibawa pemerintah sering merupakan refleksi atau cerminan dari timpangnya aspek moral (etika) para pemimpin dan petugas negara dalam hal kejujuran, keadilan, kepercayaan, integritas dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dan bersih paling tidak memiliki tiga karakteristik utama yaitu: transparansi (*transparancy*),⁴ supremasi/penegakan

sebagai kewajiban. 2) etika mau membantu agar kita jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat kita pertanggung jawabkan. 3) etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak terlalu mudah terpancing, dan juga dapat membantu agar kita jangan naif dan ekstrem. 4) etika dapat menemukan dasar kemantapan iman. Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah, Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), Cet. ke 3, h. 14. Menurut Hashullāh Bakry, kata etika (bhs. latin *ethos*) mempunyai arti semakna dengan moral/akhlak bahasa Perancis "*mœurs*" (bahasa Latin *mores*) Lihat Hasbullāh Bakry, *Sistematika Filsafat* (Yogyakarta: PHIN, 1959), h. 72, dan Roger J. Steine, *The Bantam New Colledge French & English Dictionary* (New York: The Bantam Books, tt), h. 231. Lihat: Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 77-78.

³A.W.Widjaja, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997) h. 12. Lihat juga pendapat Inu Kencana, bahwa secara etimologi pemerintahan berasal dari kata sebagai berikut: a) Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, b) Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah, c) Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Maka ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kepemimpinan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam hubungan-hubungan pusat dan daerah, antar negara, antar lembaga dan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Lihat, Inu Kencana Shafiie, *Etika Pemerintahan*, h. 12

⁴Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean Governance*) meniscayakan adanya tansparansi disegala bidang. Seluruh

hukum (*rule of law*),⁵ dan akuntabilitas (*accountability*).⁶ Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak sekedar menuntut profesionalitas serta kemampuan aparat dalam pelayanan publik, tetapi bahkan lebih fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih (*Good Governance and clean Government*) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme/ KKN.⁷

Adapun Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dengan akhlak/ etika. karena etika dalam Islam adalah: "tingkah laku manusia yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ucapan dan pikiran yang sifatnya membangun tidak merusak lingkungan dan tidak juga

mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan yaitu; penetapan posisi jabatan dan kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat, dan aparatur pelayanan publik dll. Hal ini untuk mengikis budaya nepotisme dan budaya korupsi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dalam anggaran, penggunaan uang negara untuk kepentingan individu atau golongan, dan bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Lihat. A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), cet.ke-3., h. 245-246.

⁵Pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Maka kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia, toleransi beragama, dan pluralisme.

⁶Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

⁷Sedarmayanti, *Good Governance*, h. 24.

merusak tatanan sosial budaya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadith).⁸

Menurut Qutb karena Islam sebagai sistem moral dan sumber kebaikan, pondasi tempat berpijak, dan tempat bersandarnya kekuasaan, ia juga sebagai sistem politik baik bentuk maupun karakternya, ia adalah sistem sosial, asas-asas maupun pilar-pilarnya.⁹ Islam sebagai agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi; aqidah, ibadah dan mu'amalah yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan: ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah, sekaligus mekanisme hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia itu sendiri, dan alam sekitarnya. Semua dimensi ajaran tersebut dilandasi

⁸M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 197. Maka etika dalam Islam adalah mempraktekkan ajaran al-Quran tentang perintah, larangan, janji dan ancaman, berdasarkan kepada al-Quran. Lihat: Rahmat Djatmika, *Sistem Etika Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996), h. 21. Ada shahabat yang bertanya tentang akhlak (Etika) Rasulullah saw kepada 'Āishah ra, sebagai istri Rasulullah saw yang lebih mengetahui karakteristik beliau, maka 'Āishah ra menjawab: "Akhlak Rasulullah saw itu al-Quran". Sebagaimana dalam hadithnya berbunyi:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِيَنِي بِمَخْلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ (رواه أحمد)

Lihat: Imām Ah}mad bin Hanbal, *Al-Musnad*, vol. ix (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991), cet. Ke-1, 557. Hadith lain Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". (HR. Ah}mad dan al-Bukhārī). lihat, Shāfi al-Rahmān al-Mubarakāfuri, *Al-Rahhiq al-Makhtum* (Beirūt: Dār Ihyā al-Turāth al-Islami, 1998), cet. Ke-1, h. 479, Lihat, Al-Bukhārī, *Al-Adabul Mufrad* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), cet. Ke-1, h. 90., Bab *Husnu al-Khulq*, hadith no: 273.

⁹ Sayyid Quthb, *al-Mustaqbal Lihat dha al-Din* (al-Qahirah: Dar al-Shuruq: 2008), cet ke 18, h. 5.

oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah *shari'ah* atau *fiqh*.¹⁰

Fungsi Akhlakun Karimah dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan *good governance and clean government* dalam organisasi pemerintahan. Hal ini merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna dan bebas korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Maka diperlukan sistem akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum yang baik sesuai dengan penerapan/tuntutan kebutuhan pada seluruh jajaran aparat negara yang dibimbing oleh norma, nilai-nilai dan etika agama.¹¹ Menurut Yusuf Qardhawi merupakan suatu keniscayaan bahwa sistem nilai-nilai modern yaitu:¹² *equity* (berkeadilan), transparansi, akuntabilitas, musyawarah, egalitarianisme, toleransi, pluralisme, respek terhadap hak asasi manusia (*human right*), prinsip saling menghormati, kerjasama, dan kemitraan, yang *applicable* (dapat diterapkan) dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government*-bagian dari nilai2 kepemimpinan dalam Islam itu sendiri.

¹⁰Sayyid Quthb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (al-Qahirah: Dar al-Shuruq: 2006), ke-16, h. 75.

¹¹Sedarmayanti, *Good Governance*, n. 21-22.

¹²Yusuf al-Qardhawi, *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*, terj. M. Wahid Aziz (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 166. Lihat juga Adeng Muchtar Ghazali, *Civil Education*, h. 36. Abi al-Hasan 'Ali bin Muh}ammad bin Habib al-Bashry al-Baghdady al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islamy Tarbiyah, 1996), h. 34. Lihat juga dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang *etika kehidupan berbangsa* dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia 2020, yaitu: *Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu dan demokratis*.

Maka aktualisasi nilai-nilai ke kepemimpinan Islam dalam Pancasila sangat tepat dan selaras yang tidak hanya terkait dengan ritual keagamaan, tetapi bahkan bersentuhan dengan persoalan-persoalan seputar budaya, perbaikan bagi tegaknya sistem pemerintahan, tatanan sosial, ekonomi, maupun politik yang adil.¹³

Al-Quran sebagai sumber nilai-nilai holistik, integral, *ballance* (tidak timpang) dan sudut pandang yang memiliki visi jauh ke depan. Kelebihannya yang terbesar ialah berjalan seiring dan mengaplikasikan fitrah secara integral (menyeluruh). Seluruh realitas manusia diakui dan diatur dalam al-Quran dengan tidak meninggalkan apalagi melupakan sedikitpun realitas manusia, baik fisik, akal maupun jiwanya, baik kehidupan material maupun kehidupan spritualnya.¹⁴

Dalam menatap dan mencarikan solusi secara konseptual atas permasalahan Aktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila secara langsung akan menjadi jawaban atau solusi terbaik, sehingga fungsi al-Quran sebagai sumber nilai dan hukum akan dapat dijelaskan secara elaboratif. Jelasnya, penulis ingin menawarkan di dalam tulisan ini bahwa al-Quran

¹³Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al Qurān, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. Qs.al-Hijr: 9. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Quran selama-lamanya. Shaleh Abdul Fatah al-Khālidi, *Membedah al-Quran Versi al-Quran*, terj. Muhil DA. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 85.

¹⁴M. Quthb, *Evolusi Moral*, terj. Yudian dkk (Surabaya: Ikhlas, 1995), h. 15. Lihat: Wahiduddin Khan, *Metode dan Syarat Kebangkitan Baru Islam*, Terj. Anding Mujahidin, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), Cet. 1, h. 119.

merupakan sumber nilai-nilai kehidupan, sosial, politik, pemerintahan dan budaya yang berfungsi sebagai kontrol sosial dapat diaktualisasikan dalam Pancasila. Karena Pancasila berasal dari nilai-nilai al-Quran.¹⁵

Pendekatan yang lebih tepat adalah kajian yang mengelaborasi permasalahan ini adalah dengan pendekatan tafsir tematik¹⁶ dan analitik yang menganalisis hubungan konsep-konsep dalam tafsir al-Quran dengan pemikiran kontemporer. Penelitian ini akan memfokuskan pada kitab-kitab Tafsir. Dengan Penafsiran yang moderat, komprehensif, mudah dicerna dan logis serta argumentatif.

Berdasarkan pertimbangan di atas amat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Aktualisasi Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila. Apakah nilai-nilai kepemimpinan Islam bisa diaktualisasi ke dalam Pancasila? Pancasila yang sebagian oknum masih memperdebatkannya bahkan sampai kepada konklusi adalah hukum Thogud, haram dll.

Penelitian ini akan difokuskan pada ayat-ayat yang memuat istilah-istilah yang berkaitan secara langsung dengan nilai-nilai Kepemimpinan maupun yang tidak langsung, sehingga diharapkan dari penelitian ini akan

¹⁵Yūsuf Qard}āwi, *al-Marajī'ah al Ula fi al-Islam li al-Quran wa al-Sunnah* (Qāhirah: Maktabah Wahbah, T.th), h. 32.

¹⁶Suatu metode yang menerangkan judul dari sesuatu yang berhubungan/berkisar tentang ayat-ayat al-Quran di dalam satu surat atau bermacam-macam surat, berangkat dari asumsi bahwa suatu surat al-Quran memiliki tema sentral yang tercermin pada isi surat tersebut. Istilah tafsir ini muncul pada abad 14 H, setelah dijadikannya *Tafsir Maudhu'i* menjadi salah satu mata kuliah jurusan tafsir pada kuliah Ushuluddin di Jamiah al-Azhar Mesir, tetapi coraknya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Lihat, Musthafa Muslim, *Mabahith fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), cet. 1, h. 16-17.

dapat ditemukan secara utuh konsepsi Aktualisasi Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila dan bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan masyarakat dalam konteks Penerimaan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah.

Nilai-nilai Kepemimpinan Islam yang terkadang dipahami secara temporer dan sempit banyak menimbulkan kontradiksi dalam bernegara yang seakan-akan bertentangan dengan Pancasila. Padahal nilai-nilai universal al-Quran tidak dipahami dengan utuh dan baik oleh sebagian kecil oknum. Rasulullah saw yang bergelar Shiddiq, Amanah, Thabligh dan Fathonah merupakan konsep al-Quran yang dapat diaktualisasikan ke dalam Pancasila sebagai wujud kepedulian terhadap NKRI dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal dan terpuji. Maka menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk membumikan al-Quran dengan membaca dan mentartilnya dalam arti yang optimal, mengerahkan segenap panca indera dan mata hati untuk menangkap kandungan isinya. Tanpa itu, fungsi al-Quran sebagai *hudan* bagi manusia akan menjadi tidak relevan.¹⁷

Penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat yang mengandung istilah yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai kepemimpinan, sehingga dapat diketemukan konsepsi yang tepat, dan bagaimana kontribusi dan aktualisasinya

¹⁷Shaleh Abdul Fatah al-Kholidi, *Membedah al-Quran Versi al-Quran*, h. v.

menjawab tantangan masyarakat dalam konteks Aktualisasi Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila.

Masalah aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan islam dalam pancasila yang bersumber dari kitab tafsir sangat penting untuk diteliti, karena persoalan Kepemimpinan tidak hanya menjadi otoritas ilmu politik dan pemerintahan yang bersumber dari nalar dan fakta-fakta empiris, tetapi juga nilai-nilai ideal yang bersumber dari kitab suci suatu agama. Untuk itu, penafsiran suatu kitab suci sebagaimana tafsir al-Quran tidak cukup berhenti pada pendalaman makna-makna yang terkandung di dalamnya saja, tetapi harus mampu merespon dan menjawab problematika yang aktual di tengah masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Aktualisasi nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila adalah sejumlah nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari al-Quran, baik pada ayat-ayat yang mengandung istilah yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai kepemimpinan dan pancasila, yang memiliki kontribusi terhadap konsep Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang plural, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Nilai-nilai tersebut akan dianalisis sejauh mana kontribusinya terhadap nilai-nilai Pancasila.¹⁸

¹⁸Ketika kita ingin melacak asal mula pergeseran ke bentuk modernis, kita melihat bahwa ini bukan berasal dari perdebatan internal dalam estetika sederhana tetapi mengakar pada refleksi yang kompleks atas kegelisaan sosial. jika Charles Baudelaine dan Gustave Flaubert dianggap sebagai pioner, maka asal usul modernisme dapat ditetapkan pada tahun 1848 yang berdarah-darah penindasan brutal terhadap revolusi. pada tahun dianggap sebagai penghancuran anggapan universalisme tulisan realis dan klasik. Atau kita bisa melacak asal muasalnya dalam gerakan-gerakan ketimbang pada individu, dan melihat modernisme hanya sebagai proses terjadi eksperimen

3. Perumusan Masalah

Bagaimana Aktualisasi Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila pada ayat-ayat yang mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam* dan apa relevansinya terhadap sistem pemerintahan Indonesia?

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Diawali dengan proses merancang penelitian ini, sebagai kajian tentang Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila : Penulis menemukan referensi yang membahas tema tersebut dengan istilah yang relatif sama. Istilah yang dimaksud adalah *konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Buku ini diterbitkan oleh UII Press Yogyakarta 2006, Di dalam buku ini dibahas tentang Negara dan pemerintahan pada masa khulafa al-Rasyidin, tujuan negara dan wewenang kepada negara dalam Islam. Akan tetapi, ini belum sepenuhnya menyentuh kepada *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila*, sehingga dapat diterapkan dalam konteks kekinian, dan betul-betul merupakan cerminan dari pengamalan al-Quran-sebaliknya, ia lebih mewakili konsep normatif suatu negara. Maka dari itu, dibutuhkan kajian dari teks wahyu itu sendiri- sehingga ia dapat selalu menjadi motivator bagi setiap pencari kemuliaan hidup bermasyarakat

seni *avant garde* sejak tahun 1880-an. Ada juga yang beranggapan *modernism* terjadi sejak revolusi kelas pekerja, agitasi politik feminin, teknologi baru dari revolusi industri kedua, perang imperialisme tahun 1914-1918, ditandai dengan dinamisme dan alienasi kehidupan kota-kota besar negara Eropa seperti Perancis, London, Berlin, Vienna, Petersburg. Lihat: William Outh Waite, *Kamus Lengkap Pembaharuan Pemikiran Sosial Modern*, Terj.Tti Wibowo (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2000), Edisi ke dua, Cet. Ke-1, h. 525.

dan bernegara melalui nilai-nilai ajarannya yang *aplicable* dan *up to date*.

Buku berjudul "Mengapa 7 kata ? Buku ini dicetak CV. Bina Mitra Wisesa Jakarta Pusat 2004, memuat sejarah Pembentukan Indonesia Merdeka dan Piagam Jakarta 22 juni 1945, yang di dalam buku ini menjelaskan dengan gamblang peran umat Islam dalam pembentukan Indonesia merdeka, penyusunan UUD 1945 sampai kepada Pancasila. Negara dibentuk oleh kesepakatan untuk melaksanakan *shari'at* Allah. Islam sebagai gerakan inovatif bagi mewujudkan nyatakan sebuah iman dalam pandangan hidup Islami, dengan konsep *shari'at*-nya, memerlukan dukungan sebuah negara yang memiliki daya memaksa untuk dapat dijalankan oleh manusia, meskipun pada akhirnya dihapuskannya 7 kata dalam piagam Jakarta, yang merupakan bentuk toleransi termahal umat Islam.

Sistem pemerintahan yang paling sukses adalah sistem yang berdasarkan aqidah yang tetap. Oleh karena itu, negara idamanya adalah negara Islam masa Rasulullah saw. dan masa *khulafa ' al-rashidin*. Titik tolak gagasan Sayyid Qutb tampaknya adalah bahwa selain sebagai nabi dan Rasulullah, Muhammad saw adalah juga seorang negarawan yang arif sekaligus kepala pemerintahan. Realitas historis dan empiris menunjukkan bahwa nabi Muhammad saw telah mendirikan negara bersama orang-orang pribumi (*anshar*) dan masyarakat pendatang (*muhajirin*), beliau telah membuat konstitusi tertulis (UUD) untuk berbagai suku termasuk para penganut Judaisme Madinah. Dalam sebuah piagam yang ditandangi warga dari institusi yang baru didirikan itu, nabi memberikan jaminan perlindungan (*dhiman wa aman*) kepada umat non-muslim, beliau mengirim dan menerima duta-duta, dan membuat perjanjian. Inilah negara yang paling konstitusional, tetapi patut diingat bahasa negara di Madinah

bukan teokrasi-karena dalam mendirikan negara-kota (*city state*) Madinah, nabi tidak mengklaim mendapatkan legitimasi ketuhanan-tetapi tatkala wahyu tidak merinci secara detail tentang persoalan kenegaraan, lebih memilih *al-shura*.

Di sini penulis ingin menjadikan *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* sebagai salah satu tema sentral kajian al-Quran dan Pancasila. Dengan metode yang penulis pilih diharapkan akan terungkap kontribusi nilai-nilai Kepemimpinan Islam normatif di dalam al-Quran terhadap Pancasila.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan di antaranya:

Untuk menjelaskan argumentasi rasional yang membuktikan validitas tema: mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung istilah yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Pancasila dengan cara menelaah rahasia ayat, tujuan ayat dan pesan-pesan yang dikandung di dalamnya. Penulis melakukan identifikasi tentang sasaran dari kajian persoalan-persoalan terkait agar dapat merumuskan konsep *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* dan kontribusinya terhadap sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam al-Quran* dan

memiliki integrasi dengan sistem nilai Pancasila tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami.

- b. Sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan dalam mewujudkan reformasi pemerintahan yang baik dan bersih. Konsepsi al-Quran mengenai *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru dalam konteks ilmu pemerintahan, karena selama ini ilmu pemerintahan hanya bersumber pada rasio akal dan penelitian-penelitian lapangan yang bersifat empiris.
- c. Sumbangan pemikiran dalam kajian tafsir al-Quran dengan mencari pengaruh nilai-nilai al-Quran dalam Kepemimpinan Islam dengan konteks Pancasila, maka tafsir al-Quran tidak berhenti pada perumusan nilai-nilai al-Quran yang melangit, tetapi konsep-konsep yang membumi yang dapat memecahkan problematika umat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi yang akan dipakai dalam penelitian ini:

- a. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik,¹⁹ untuk mengumpulkan data dimulai dengan pencarian dan

¹⁹Suatu metode yang menerangkan judul dari sesuatu yang berhubungan/berkisar tentang ayat-ayat al-Quran di dalam satu surat atau bermacam-macam surat, berangkat dari asumsi bahwa suatu surat al-Quran memiliki tema sentral yang tercermin pada isi surat tersebut. Istilah tafsir ini muncul pada abad 14 H, setelah dijadikannya Tafsir Maudhu'iy menjadi salah satu mata kuliah jurusan Tafsir pada Kuliah Ushuluddin di Jamiah al-Azhar Mesir, tetapi coraknya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Lihat; Musthafa Muslim, *Mabahith fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), cet.1., h. 16-17. lihat juga, 14

inventarisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Quran* karya Muhammad Fuād Abdul Baqiy dan *al-Mu'jam al-Maudhu'i li Ayati al-Quran al-Karim* karya Hassān Abdul Mannan. Sebagai sumber data primer akan digunakan *Tafsir al-Quran dan Pancasila*.

Adapun sumber data sekunder adalah kitab-kitab, hadith, sejarah serta buku-buku yang memiliki kaitan dengan mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila*, baik yang langsung dari pemikiran dunia Barat maupun dari dunia akademisi Timur, dan pendukung lainnya yang dianggap perlu.

b. Metode Analisis data

Semua referensi tafsir ini akan dirujuk saat menelaah makna suatu istilah, konsep atau hukum yang terdapat pada ayat-ayat tersebut dari penafsiran yang berasal dari Kitab-Kitab Tafsir: akan dideskripsikan apa adanya, lalu dianalisis dengan cermat, aspek pemikiran mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* berikut kecenderungan-kecenderungannya dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung istilah yang berkaitan langsung dengan *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila*. kemudian dilanjutkan dengan penarikan konklusi. Dalam hal ini pendapat yang dikutip adalah pendapat yang menurut hemat penulis mempunyai argumentasi terkuat dan berkontribusi terhadap mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila*.

Untuk analisa kebahasaan, penulis merujuk kamus-kamus bahasa Indonesia dan kamus-kamus bahasa asing yang

Ziyad Khalil Muhammad al-Daghawain, *Manhajiyah al-Bahath fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Qahirah: al-Hadharah al-'Arabiyah, 1995), h. 14.

diperlukan. Semua sumber data yang dirujuk ditelaah secara kritis sehingga konklusi yang diambil akurat dan rasional. Proses analisis itu sendiri dilakukan dengan metode berfikir induktif dan deduktif²⁰ dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Data yang berupa ayat-ayat al-Quran diidentifikasi baik yang mengandung istilah berkaitan langsung dengan mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila*. Nilai-nilai tersebut akan dianalisis sejauh mana kontribusinya terhadap Pancasila.²¹ sehingga terbentuk suatu konsep tentang *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* yang utuh dalam rangka merealisasikan Kepemimpinan yang baik dan bersih.
2. Konsep-konsep mengandung *Nilai-nilai kepemimpinan Islam* yang telah tersusun tersebut kemudian didialogkan dengan Pancasila dengan metode analitik, sehingga diketemukan suatu mengandung Aktualisasi *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila*.
3. Hasil dari studi kritis terhadap *Nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam Pancasila* akan menuntun pada konsep Pancasila yang mengandung

²⁰Metode induktif yaitu: Cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu: cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Lihat: Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 48. dan C.A. Qodir (ed), *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 137.

²¹Klasifikasi dilakukan dengan menganalisa isi kandungan ayat dengan uraian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Lihat; M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik al-Quran* (Bekasi: PT. Gugus Press, 2002), h. 154-155.

nilai-nilai Islami yang tidak lagi menjadi perdebatan kalangan umat Islam akan hukum Pancasila dalam pemerintahan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN ISLAM DAN PANCASILA

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses pengaruh satu arah maupun timbal balik untuk mencapai ketaatan. Kepemimpinan bisa saja terfokus pada satu individu, tetapi tidak harus selalu demikian. Kadang-kadang kepemimpinan diperlukan seolah-olah sebagai terminal akhir bersama manajemen, tetapi kajian kepemimpinan cenderung makin menekankan pada berbagai aspek perubahan.

Dalam organisasi yang terbentuk akan menciptakan pemimpin-pemimpin. Demikian juga pemahaman setiap orang mengenai kepemimpinan akan beragam, sesuai pengalaman keorganisasian masing-masing. Begitu banyak definisi mengenai kepemimpinan, menurut Bass dan Stogdill sebagaimana telah dikutip oleh Usman bahwa lebih dari 3000 penelitian dan definisi kepemimpinan yang telah diciptakan manusia.²²

Definisi kepemimpinan sangat bervariasi sekali. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai konsep kepemimpinan atau definisi kepemimpinan, dan itu semua tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan

²²Husaini Usman, *Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), h.

organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.²³

Kepemimpinan berasal dari kata *leadership* dari asal kata *to lead*. Dan kata ini menjadi bahasa Inggris yang diindonesiakan karena sering digunakan dan terdapat di berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam kata kerja *to lead* terkandung beberapa makna yang saling berhubungan erat, yaitu: bergerak lebih cepat, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat lebih dulu, memelopori, mengarahkan pikiran orang lain, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.²⁴

Definisi kepemimpinan secara etimology dapat diartikan sebagai berikut:²⁵

- a. Berasal dari kata "pimpin" (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti bimbing atau tuntun. Dengan demikian didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin dan yang memimpin.
- b. Setelah ditamba "Pe" menjadi pemimpin (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti orang yang mempengaruhi orang lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Apabila diberi akhiran "an" menjadi pimpinan, artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin

²³ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2003), h. 2-3

²⁴ Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, (Malang: Aditya Media, 2006), h. 36

²⁵ Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 71

dengan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) lebih bersifat sentralistik, sedangkan pemimpin lebih demokratis.

- d. Setelah dilengkapi awalan "ke" menjadi kepemimpinan (dalam bahasa Inggris *leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Secara terminology, terdapat beberapa definisi tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang dianut oleh orang banyak dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian orang tersebut mempunyai wibawa, kekuasaan ataupun pengaruh (terjemah dari *authority, power, influence*).²⁶ Beberapa ahli menjelaskan pengertian kepemimpinan, antara lain:

- 1) Mochtar Effendy dalam bukunya *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* menyatakan: "kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendak atau gagasannya."²⁷
- 2) Sondang P. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi* mengatakan: "Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, karena

²⁶Budi Santoso, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984). h. 5

²⁷Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bratara Karya Ilmiah, 1986), h. 207

kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat lainnya dalam suatu organisasi."²⁸

3) Imam Suprayogo juga mengatakan: "kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau group untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan."²⁹

4) Wasty Soemanto dan Hendyat Soetopo dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dalam Pendidikan* mengatakan: "kepemimpinan merupakan suatu fungsi dari pada interaksi manusia. Seseorang tidak dapat melaksanakan kepemimpinan seorang diri. Tindakan kepemimpinan harus mempengaruhi orang lain."³⁰

Batasan-batasan di atas mencerminkan bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial (*process of influence*) yaitu pengaruh yang sengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pimpinan dan yang dipimpin.³¹ Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari komunikasi interaktif (*interaktif communication*) antara pimpinan dan yang dipimpin. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat

²⁸Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 28

²⁹ Suprayogo, 2006, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, h. 161

³⁰Wasty Soemanto, Hedyat Soetopo, *Kepemimpinan dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 25

³¹Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1990), h. 5

ditarik kesimpulan bahwa kesimpulan pokok dari kepemimpinan adalah kemampuan memimpin seseorang yang diproyeksikan dalam bentuk kegiatan atau proses mempengaruhi, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau memotivasi orang lain agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setidaknya ada lima unsur dalam kepemimpinan, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- 1) Adanya seseorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin (*leader*)
- 2) Adanya orang lain yang dipimpin
- 3) Adanya kegiatan mengorganisir atau menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan perasaan, pikiran dan tingkah laku
- 4) Ada tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun yang bersifat seketika
- 5) Berlangsung berupa proses didalam kelompok atau organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang yang dipimpin.³²

2. Syarat-syarat Kepemimpinan

Pemimpin merupakan seorang yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi, baik itu organisasi sosial keagamaan maupun non keagamaan. Sehingga seorang pemimpin diharuskan memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dan memiliki kelebihan-kelebihan dari pada orang yang dipimpinnya.

³²Hadari Nawawi dan Matin Hadari, *Kepemimpinan yang Efektif*. (Yogyakarta: Gajahmada University perss. 2004), h. 15

Di antara persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah:³³

a. Beriman

Seorang muslim di manapun ia berada dan apapun jabatannya, dia harus beriman dan senantiasa berusaha mempertebal keimanannya dengan jalan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.

b. Mental

Seorang pemimpin harus mempunyai mental yang kuat, tangguh dan baik. Bagi seorang pemimpin muslim mental itu adalah produk dari iman dan akhlak.

c. Kekuasaan

Seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan, otoritas, legalitas yang ia gunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan sesuatu.

d. Kewibawaan

Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan dan kemampuan untuk mengatur orang lain, sehingga pemimpin yang memiliki sifat tersebut akan ditaati oleh bawahannya.

e. Kemampuan

Kemampuan segala daya, kekuatan dan ketrampilan, kemampuan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa.

Persyaratan-persyaratan di atas merupakan persyaratan umum yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, baik pemimpin negara, perguruan tinggi,

³³Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, h. 31

pondok pesantren, partai politik ataupun pemimpin organisasi lainnya.

Di samping mempunyai persyaratan tersebut di atas, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari orang yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan agar kelompok suatu organisasi tersebut dapat mencapai kemajuan.

Sebagai pemimpin yang membawahi berbagai macam permasalahan maka harus memiliki beberapa kelebihan,³⁴ antara lain:

- 1) Memiliki kecerdasan, atau intelegensi yang cukup baik.
- 2) Percaya diri sendiri dan *membership*
- 3) Cakap bergaul dan ramah tamah
- 4) Kreatif, penuh inisiatif dan memiliki hasrat atau kemauan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik.
- 5) Organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa
- 6) Memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidangnya
- 7) Suka menolong memberi petunjuk dan dapat menghukum secara konsekuen dan bijaksana.
- 8) Memiliki keseimbangan atau kestabilan emosional yang bersifat sabar.
- 9) Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi.
- 10) Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab.
- 11) Jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya.
- 12) Bijaksana dan selalu berlaku adil.

³⁴ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 84-90

13) Disiplin

14) Berpengetahuan dan berpandangan luas.

15) Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan-persyaratan dan kelebihan-kelebihan di atas harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

3. Tipe-tipe Kepemimpinan

Untuk selanjutnya perlu juga penulis jelaskan pula tentang tipe-tipe kepemimpinan dalam suatu lembaga atau organisasi di antaranya:

a. Tipe Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional menurut Veitzal Rivai merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa semua kepemimpinan tergantung kepada keadaan atau situasi. Situasi adalah gangguan yang terpenting bagi seorang pemimpin untuk beroperasi. Dalam penerapannya kepemimpinan situasional, seorang pemimpin harus didasarkan pada hasil analisis terhadap situasi yang dihadapi pada suatu saat tertentu dan mengidentifikasi kondisi para anggotanya. Adapun model kepemimpinan situasional adalah:

1) Model kepemimpinan kontigensi

Yaitu teori yang membahas gaya kepemimpinan apa yang paling baik dan gaya kepemimpinan apa yang tidak baik, tetapi teori ini juga mengemukakan bagaimana tindakan seorang pemimpin dalam situasi tertentu perilaku kepemimpinannya yang efektif, dengan kata lain yang membahas perilaku berdasarkan situasi.³⁵ Dari teori tersebut dapat difahami bahwa seorang pemimpin dalam memperagakan kepemimpinannya tidak berpedoman pada salah satu perilaku saja dari waktu ke waktu melainkan

³⁵ Ibid, h. 70

didasarkan pada analisis setelah ia mempelajari situasi tertentu.

2) Model kepemimpinan situasional menurut *Hersey dan Blanchard*

Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan diagnostic bagi pemimpin atau manajer tidak bisa diabaikan, seperti terlihat pada "manajer yang berhasil harus seorang pendiagnosis yang baik dan dapat menghargai semangat mencari tahu"³⁶ Pemimpin harus mampu mengidentifikasi isyarat-isyarat yang terjadi dilingkungannya, tetapi kemampuan untuk mendiagnosis saja belum cukup untuk berperilaku yang efektif. Pemimpin juga harus mampu mengadakan adaptasi perilaku kepemimpinan terhadap tuntutan lingkungan di mana ia memperagakan kepemimpinannya. Dengan kata lain seorang pemimpin maupun manajer harus memiliki fleksibilitas yang bervariasi.

b. Tipe Kepemimpinan Kharismatik

Pemimpin kharismatik adalah pemimpin yang mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari para pengikutnya, sehingga apa yang diperbuatnya dianggap selalu benar. Dalam hal ini pengikut-pengikut beranggapan bahwa pemimpin yang mereka anut selalu dekat dengan Tuhan.³⁷

Kharisma yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Kharisma tersebut melekat pada seseorang karena anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya akan mengakui akan

³⁶Ibid., h. 72.

³⁷Moch. Idhoni Anwar, *Kepemimpinan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 7

adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan manusia umumnya pernah terbukti manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat.³⁸

Tipe kepemimpinan kharismatik ini biasanya dimiliki oleh tokoh-tokoh besar, utamanya bagi kiai sebagai tokoh agama. Mereka dianggap memiliki daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga logis jika kiai yang kharismatik memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka dianggap mempunyai kekuatan ghoib (supranatural) dan kemampuan-kemampuan yang super human yang diperolehnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.³⁹

Bahkan dapat diyakini oleh masyarakat dapat memancarkan berokah bagi umat yang dipimpinnya, di mana konsep barokah ini dengan kapasitasnya seorang pemimpin yang sudah dianggap memiliki karomah (kekuatan ghoib yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada yang dikehendaki-Nya).⁴⁰

Sementara itu *Ngalim Purwanto*⁴¹ menjelaskan seorang pemimpin yang mempunyai kharismatik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai daya tarik yang sangat besar.

³⁸ Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 311

³⁹ Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, h. 51.

⁴⁰ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tyebu Ireng)*, (Malang: Kalimasada, 1983), h. 45.

⁴¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 51.

- 2) Pengikutnya tidak dapat menjelaskan mengapa ia tertarik mengikuti dan mentaati pemimpin itu.
- 3) Dia seolah-olah memiliki kekuatan ghoib.
- 4) Kharismatik yang dimiliki tidak tergantung pada umur, kekayaan, kesehatan ataupun ketampanan pemimpin.

c. Tipe Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan Partisipatif merupakan tipe kepemimpinan yang menggunakan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan dan memberikan orang lain suatu pengarahan tertentu terhadap keputusan-keputusan pemimpin. Menurut Koontz Dkk bahwa kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan bawahan-bawahannya mengenai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diusulkan dan merangsang partisipasi dari bawahannya.⁴²

Sedangkan Menurut Gary Yukl kepemimpinan partisipatif dianggap sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda dengan perilaku yang berorientasi kepada tugas dan yang berorientasi kepada hubungan.⁴³

Selanjutnya Gary Yukl menambahkan beberapa prosedur pengambilan keputusan dalam kepemimpinan partisipatif, di antaranya:⁴⁴

- 1) Keputusan yang otokratif: pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan opini atau saran orang lain, dan orang-orang tersebut tidak

⁴²Koontz, Dkk. *Industri manajemen 2* (Assential Of Management terejemahan oleh A.Hasyim Ali) (Jakarta : Bina Aksara 1999), h. 608

⁴³Gary Yulk. *Kepemimpinan dalam organisasi*. Terjemahan oleh Jusuf Udaya.. (Jakarta: Prenhallindo 1998), h. 132

⁴⁴Ibid, h. 133

- mempunyai pengaruh yang langsung terhadap keputusan tersebut, tidak ada partisipasi.
- 2) Konsultasi: pemimpin menanyakan opini dan gagasan, kemudian mengambil keputusannya sendiri setelah mempertimbangkan secara serius saran-saran dan perhatian mereka
 - 3) Keputusan bersama: pemimpin bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah tersebut, dan mengambil keputusan bersama, pemimpin tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap keputusan akhir seperti peserta lainnya.
 - 4) Pendelegasian: pemimpin memberi kepada seorang individu atau kelompok, kekuatan serta tanggung jawab untuk membuat keputusan, pemimpin tersebut biasanya memberikan spesifikasi mengenai batas-batas mana pilihan terakhir harus berada, dan persetujuan terlebih dahulu mungkin atau tidak mungkin tidak perlu diminta sebelum keputusan tersebut dilaksanakan

d. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Tipe kepemimpinan otoriter tergolong tipe kepemimpinan yang paling tua dan paling banyak dikenal. Kepemimpinan otoriter berlangsung dalam bentuk "*working on his grip*", karena pemimpin menempatkan dirinya diluar dan bukan menjadi bagian orang-orang yang dipimpinya. Pemimpin menempatkan dirinya lebih tinggi dari semua anggota organisasinya, sebagai pihak yang memiliki hak berupa kekuasaan. Sedangkan orang yang

dipimpinnya berada dalam posisi yang lebih rendah, hanya mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab.⁴⁵

Gaya kepemimpinan otoriter ini memberikan perhatian yang tinggi pada tugas dan perhatian yang rendah pada hubungan. Pemimpin yang menganut gaya ini selalu menetapkan kebijaksanaan dan keputusan sendiri.⁴⁶

e. Tipe Kepemimpinan Personal

Tipe kepemimpinan personal dalam pesantren adalah kepemimpinan kiai yang mengarahkan pada sifat pribadi (personal). Menurut Rahardjo yang dikutip Najd bahwasanya kepemimpinan personal mengarah kepada segala masalah kepesantrenan bertumpuh pada kiai.³⁷ Dan berkat tempaan pengalamannya mendirikan pesantren sebagai realisasi cita-cita kiai, akhirnya timbulah corak kepemimpinan yang sangat pribadi sifatnya, yang berlandaskan pada penerimaan masyarakat sekitar dan warga pesantrennya secara mutlak. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan personal hanya mungkin terjadi jika pemimpin yang terkait adalah pendiri, pemilik dan atau minimal orang yang sangat berjasa terhadap organisasi tersebut.

f. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Bentuk kepemimpinan di sini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Sehingga nampak adanya hubungan antara kiai dengan lembaga pendidikan terjalin secara harmonis yang diwujudkan

⁴⁵ Hadari Nawawi. *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: UGM Press, 1993), h. 161.

⁴⁶ E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 115

kepemimpinan dalam sebuah lembaga akan dapat berlangsung secara mantap dengan munculnya gejala-gejala sebagai berikut:⁴⁸

- a) Organisasi dengan segenap bagiannya berjalan lancar sekalipun pemimpin tersebut tidak ada di kantor
- b) Otoritas sepenuhnya dideliasikan ke bawah, dan masing-masing orang menyadari tugas dan kewajibannya, sehingga mereka merasa senang, puas dan aman menyangkut setiap tugas dan kewajibannya.
- c) Diutamakan tujuan kesejahteraan pada umumnya dan kelancaran kerja sama pada setiap kelompok.
- d) Dengan begitu pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat dinamisme dan kerja sama demi pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa kelompok dan situasinya.

g. Tipe Kepemimpinan Laisser Faire (Bebas)

Tipe ini adalah tipe seorang pemimpin praktis dan tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semauanya sendiri, ia tidak ikut berpartisipasi karena semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol dan biasanya tidak memiliki ketrampilan teknis. Sebab duduknya seorang direktur atau pemimpin biasanya diperoleh melalui suapan atau sistem nepotisme. Jadi pemimpin seperti ini pada hakekatnya bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya.

⁴⁸Tim Dosen Jur. Administrasi PIP IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan IKIP Malang*, 1989, h. 268-269.

Tipe ini adalah tipe seorang pemimpin praktis dan tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri, ia tidak ikut berpartisipasi karena semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol dan biasanya tidak memiliki ketrampilan teknis. Sebab duduknya seorang direktur atau pemimpin biasanya diperoleh melalui suapan atau sistem nepotisme. Jadi pemimpin seperti ini pada hakekatnya bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya.

h. Tipe Kepemimpinan Administratif

Yaitu kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Sedangkan pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika pembangunan.

B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

1. Istilah Kepemimpinan dalam Islam

Dalam Islam, istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti, *Imām*, *Ulil Amri*, *Khalifah*, hingga *Amir al-Mukminin*. Kepemimpinan atau *Imāmah* menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja (*amma*), (*ammahum wa amma bihim*) artinya mendahului mereka, yaitu *Imāmah*. Sedangkan al Imam ialah setiap orang yang diikuti.⁴⁹ Imam menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan

⁴⁹Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet. 9, h. 214.

yang lurus atau sesat.⁵⁰ Dalam (QS. al-Furqan, 74) kata imam dipakai untuk orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus. Imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar (*imamah kubra*) umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh *Ahl al-halli wal Aqdi* dalam majlis syura untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem Rabb semesta alam.⁵¹ Kendatipun kata imam sering dipakai al-Qur'an untuk para pemimpin kebaikan dan kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan.⁵² *Ulil Amri* dalam Tafsir al-Māidah 55 yaitu orang beriman yang mendirikan shalat, membayar zakat dan selalu tunduk kepada Allah.⁵³ Perintah untuk taat kepada *Ulil Amri* sebagai pembina masyarakat, sehingga bisa bergaul dengan sesama manusia lewat aturan pemimpin yang mengatur pekerjaan itu.⁵⁴

Kemudian, *Khalifah* sendiri bermula dari Nabi Adam, kemudian anak keturunannya dari para Nabi, Rasul, dan pengikutnya yang baik. Bila sebuah bintang hilang, kelak digantikan oleh bintang yang lain yang menyinari manusia dalam menempuh perjalanannya yang sudah mulai gelap

⁵⁰Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Qāhira: Dār al-Ma'ārif, 1119), h. 200-201.

⁵¹Hussain bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press), h. 113.

⁵²Lihat Hussain bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press), h. 110.

⁵³Lihat Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 1999), h. 250.

⁵⁴Lihat Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), h. 87.

akibat kelalaian dan pelanggaran.⁵⁵ Yang terpenting bagi umat Islam, baik disebut *Imam*, *Khalifah*, atau *Amirul Mukminin* serta nama semisal di masa yang akan datang tidak akan mengubah statusnya sebagai alat bagi pelaksana syariat Islam yang telah ditentukan rambu-rambunya oleh Allah. Ketundukan kepada al-Qur'ān dan Hadīth menjadikan sebuah pengakuan bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya hanya milik Allah.⁵⁶

Adapun *Ulil Amri* merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya mustahil dia akan memimpin umat menempuh jalan Allah.⁵⁷ Para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan maksud *Ulil Amri* adalah pemimpin (umara).⁵⁸ Pemimpin harus selalu ruku' (*wa hum raki'un*) sebagai simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan memeluk Islam secara komprehensif, baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat.⁵⁹ Selain

⁵⁵Lihat Hussain bin Muhammad, *Menuju Jama'atui Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press), h. 105.

⁵⁶ Lihat A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Bandung: Prenada Media: 2003), h. 108.

⁵⁷Lihat Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 1999), h. 248.

⁵⁸ Lihat Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulṭhanīyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibnu, 1989), h. 5.

⁵⁹Lihat Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 1999), h. 249.

itu, hukum yang mengikat baik menyangkut pelaksanaan maupun legalisasinya juga menjadikan umat Islam harus dipimpin umat Islam pula. Karena dialah yang mengumumkan jihad, menegakkan hukum dan mendirikan shalat.⁶⁰ Oleh karena itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah.⁶¹ Bukan kekuasaan mutlak seperti kekuasaan yang berada di tangan Kaisar.⁶² Karena itu seorang pemimpin harus memiliki jiwa pengabdian, sesuai dengan tujuan mendirikan Negara itu sendiri yaitu untuk melaksanakan perintah Allah.⁶³

Dapat dipahami bahwa pemimpin dalam Islam adalah yang mengatur segala keperluan masyarakat berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat dalam rangka menjaga agama dan segala prinsip-prinsipnya. Adanya syariat menjadi instrumen dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, jangkauan untuk diangkatnya pemimpin terkait aspek yang mencakup *personal, how to get* dan *how to rule*.

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan sebutan *Kholifah* yang berarti wakil atau pengganti. Istilah ini dipergunakan setelah wafatnya Rosulullah SAW namun jika merujuk pada firman Allah SWT:

⁶⁰ Lihat Hussain bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press), h. 113

⁶¹ Lihat Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Diantama, 2006), h. 645.

⁶² Jurji Zaidan, *Tarikh at-Tamaddun al-Islami* (Turki: Dār al-Hilāl, 1958), Juz 5, h. 127.

⁶³ Lihat Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 98.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An Nisa': 59)

Dan An Nisa' ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
 وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan,

belum lama masuk islam, karena dari pemahaman mereka akan wilayah yang dipimpinnya dinilai mampu mempertimbangkan keputusan terbaik untuk masyarakat.⁶⁴

Menetapkan kriteria seorang pemimpin tidaklah sederhana. Sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, bukan sekedar penguasa. Dan pekerja seperti digambarkan oleh al-Qur'ān haruslah orang yang kuat dan terpercaya (QS. al-Qashash, 26). Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.⁶⁵

Pemimpin yang amanah tidak akan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan yang hanya akan menimbulkan ketegangan serta konflik.⁶⁶ Peran penerima amanah (kepala Negara) tidak harus dari keturunan Quraisy seperti yang sudah didiskusikan oleh para ulama. Memang pada masanya suku Quraisy memang disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab karena pandai berdiplomasi dan menguasai perdagangan. Suku Quraisy dalam (QS: al-Quraish,1-4), pengertian keturunan Quraisy sendiri merupakan keturunan Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nasr bin Ma'ad bin Adnan.⁶⁷ Secara prinsipil suku Quraisy memang dapat diangkat sebagai kepala Negara dan menjadi

⁶⁴Lihat Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulḥaniyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibnu , 1989), h. 18.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 19.

⁶⁶Lihat Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani Press, 2003), h. 149.

⁶⁷Lihat Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sulḥāniyah*, hal. 4., lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Perdana Media, 2003), h. 110.

sayang termasuk di dalamnya, hal itu pula yang diakui oleh orang nonmuslim: "*Umar mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran symbol-symbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambilalihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam*".⁷²

Adapun ketika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah membebaskan Yordania dan mendapat perlawanan dari bangsa Romawi. Yang menarik dari pernyataan tersebut, yaitu adanya permintaan kaum Kristen atau Nasrani kepada umat muslim agar membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, bunyinya: "*Kalian wahai kaum muslimin lebih kami cintai dari pada Romawi meskipun agama mereka sama dengan kami. Kalian lebih bisa memenuhi janji, lebih ramah, lebih bisa menahan tangan dari berbuat zalim, dan lebih baik dalam hal melindungi kami, tetapi mereka (Romawi) selalu memaksa kami*".⁷³

Pemimpin tertinggi dari Gereja Anglikan Inggris juga pernah mengejutkan publik Inggris. Dia mengatakan bahwa: "*Adopsi sejumlah syaria Islam dalam dasar hukum Inggris adalah hal yang tak terhindarkan. Sebab, syaria Islam tak sering bertentangan dengan struktur dan pola*

⁷²Lihat Karen Armstrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997), hal. 228., lihat juga Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam*, (Jakarta: GIP, 2004), h. 23.

⁷³Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, (London: Constable & Company, 1913), h. 48.

*hidup warga Inggris, ia mengakui bahwa syariah Islam mencakup aturan yang luwes, tapi komprehensif. Dia mencontohkan, tiap muslim yang terlibat sengketa dari pernikahan sampai finansial dapat menemukan solusi yang menunjukkan betapa lengkapnya syariah Islam."*⁷⁴

Oleh karena itu, yang memahami syariat hanyalah pemimpin yang beragama Islam, mayoritas muslim juga menjadi acuan mengapa syariat diaplikasikan. Bahkan manakala mayoritas diwajibkan tunduk dan patuh pada syariat, justru minoritas akan terlindungi.⁷⁵ Dasar semacam ini yang nantinya akan mengarahkan kecakapan pemimpin dalam memerintah agar kebijakan semakin akurat ketika kepemimpinan mampu menghadirkan pemerintahan yang harmonis dengan berlandaskan *Tauhidullah* tanpa memandang ras dan warna kulit. Hanya dua hal yang mendapat manfaat dari keberlangsungan kepemimpinan Islam, yaitu agama dan rakyat.

3. Prinsip Kepemimpinan

Islam adalah agama fitrah, ia sama sekali tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Qur'an dan as Sunnah

a. Prinsip Tanggung Jawab

Didalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban

⁷⁴Koran Jawa Pos Edisi 8 Pebruari 2008

⁷⁵Lihat Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan: Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2012, h. 103.

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori diatas. Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus difahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.⁷⁶

b. Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.⁷⁷

c. Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.⁷⁸ Firman Allah SWT surat Asy Syura' ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan

⁷⁶ Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2004), h. 16.

⁷⁷ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama press. 2005), h. 58

⁷⁸Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, h. 7

kepada mereka." (QS. Asy Syuraa: 38) Dan dalam surat Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imron: 159)

d. Prinsip Adil

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Maidah: 8)

4. Karakteristik Pemimpin Ideal

Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Setia, pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah
- b. Terikat pada tujuan, seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin meliputi tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga ruang lingkup tujuan islam yang lebih luas.
- c. Menjunjung tinggi syariah dan akhlaq islam, seorang pemimpin yang baik bilamana ia merasa terikat dengan peraturan islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia tidak menyimpang dari syariah. Waktu ia melaksanakan tugasnya ia harus patuh

pada adab-adab islam, khususnya ketika berhadapan dengan orang yang dipimpinnya

- d. Memegang teguh amanah, seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menganggapnya amanah dari Allah SWT, yang disertai dengan tanggung jawab. Al Qur'an memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".(QS. Al-Hajj: 41)

- e. Tidak sombong, menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil, karena yang yang besar dan maha besar hanyalah Allah, sehingga hanya Allah lah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu cirri yang patut dikembangkan.
- f. Dislipin, konsisten dan konsekwen, merupakan ciri kepemimpinan dalam islam dalam segala tindakan dan perbuatan seorang pemimpin. Sebagai perwujudan seorang pemimpin yang professional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan, karena ia menyadari

bahwa Allah mengetahui semua yang ia lakukan bagaimanapun ia berusaha untuk menyembunyikannya.⁷⁹

- g. Cerdas (Fathanah), pemimpin yang cerdas akan dapat mengambil inisiatif secara tepat, cermat, dan cepat ketika menghadapi problem-problem yang ada dalam kepemimpinannya
- h. Terbuka (bersedia dikritik dan mau menerima saran dari orang lain), sikap terbuka ini mencerminkan sikap tawadlu' (rendah hati)
- i. Keikhlasan, tanpa keikhlasan amal perbuatan akan sia-sia dalam pandangan Allah.⁸⁰

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan sosial, Negara, agama, maupun partai politik apabila pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagai mana dipaparkan di atas maka insya Allah kepemimpinannya pasti diridloi oleh Allah SWT dan tujuan yang diinginkan akan mudah tercapai serta kepemimpinannya akan dipertanggung jawabkan baik dihadapan manusia didunia maupun di hadapan Allah kelak di Akhirat.

5. Kriteria Pemimpin Menurut Ulama Klasik

Peran pemimpin mengaplikasikan aturan tentu demi terwujudnya konsensus. Tatkala dipandang secara tendensius setiap wilayah memiliki kecenderungan sehingga baik menurut suatu wilayah belum tentu baik

⁷⁹Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, h. 73-74

⁸⁰Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*, h. 28-29

menurut wilayah yang lain, kesannya menjadi relativis. Oleh karena itu, perlunya seseorang untuk mengaplikasikan aturan yang universal, dan itu hanya dimiliki oleh syaria'at. Kepemimpinan Islam bukan dalam rangka memonopoli kekuasaan, larangan dipilihnya nonmuslim sebagai pemimpin karena memang di luar Islam tidak memiliki hukum yang universal di samping agama juga melarang pemimpin non muslim. Dalil yang melarang mengangkat nonmuslim bukan hanya satu dalil, yakni al-Maidah: 51, dalil-dalil yang lain jumlahnya sangat banyak, dari al-Qur'ān (QS. Ali Imran, 28, 100, 118; al-Mumtahanah, 1; al-Maidah 57; al-Mujadalah, 22; al-Nisa, 141,144; al-Anfal, 73; al-Taubah, 8,71), al-Sunnah, Ijmā' dan Qiyas. Bahkan dalil lain yang lebih spesifik menunjukkan pada haramnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin adalah *saddu dzarai'*.

Dan ulama klasik maupun kontemporer juga bersepakat jika yang utama dari seorang pemimpin harus beragama Islam. Secara garis besar tugas dan kewajiban kepala negara terpilih menurut al-Mawardi meliputi pemeliharannya terhadap agama, melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, memelihara keamanan dalam negeri, menegakkan hudud, menyampaikan amanah, dan memerhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama.⁸¹

⁸¹al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-din*, terj. Ibrahim Syu'aib, *Etika Agama dan Dunia*, (Bandung: Pustaka setia, 2002), h. 100 -101.

Kemampuan manajerial dalam mengelola pemerintahan menandakan bahwa ilmu saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola pemerintahan. Hal ini dalam rangka melindungi agama dan menegakkan hukum demi kepentingan umum. Ibnu Khaldun berpendapat jika pemimpin harus memiliki solidaritas yang kokoh dari kelompoknya, tanpa solidaritas dari kelompok seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan lama bertahan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pada masa Ibnu Khaldun, maka yang paling kapabel dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Quraisy.⁸² Kesadaran dari seorang pemimpin hendaknya dapat dipahami jika ia mesti mengetahui bahwa Allah memberi kekuasaan kepada mereka.⁸³ Demikianlah mengapa al-Ghazāli sampai menyatakan bahwa penguasa adalah bayang bayang Tuhan di muka bumi (*Zhill Allah fi al-Ardh*).⁸⁴

Hampir sama dengan Ibnu Khaldun dan al-Mawardi jika perumusan kriteria pemimpin menurut beliau harus keturunan Quraisy. Sebab selain faktor dari mata rantai keluarga Abbasiyah (keturunan Quraisy), kriteria lain yang mendasar termasuk pendidikan sedikitya setara mufti atau kapasitas mujtahid menurut al-Ghazali.⁸⁵ Jika kekurangan khalifah dalam hal militer dan politik dapat ditambal dengan adanya sultan yang loyal sebagai pendamping khalifah, maka ilmu pengetahuan dan pendidikan yang

⁸²Lihat Muhammad Iqbal, *Politik Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 49

⁸³*Ibid.*, h. 49.

⁸⁴*Ibid.*, h. 77-78.

⁸⁵ Abu Hamid al-Ghazāli, , *al-Iqtishad fi al-I'tiqaad*, (Mesir, Maktabah al Jundi, 1518), hal. 151.

layak menjadi senjata utama dalam memberi nasihat dan masukan dari seorang yang takut kepada Allah yaitu ulama.⁸⁶ Komposisi sosok Rasulullah yang berperan sebagai pemimpin agama dan Negara tidak akan pernah disandang oleh satu orang di masa sekarang. Jadi, peran tersebut dapat tergantikan meski diamanahkan kepada dua orang, yakni ulama dan umara.

Sedikit berbeda dari ulama sebelumnya, Ibnu Taimiyah berpendapat bagi seorang kandidat kepala negara tidak mengutamakan suku Quraisy dimana beliau hidup pada masa kehalifahan Bani Abbas. Beliau mensyaratkan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (quwwah). Indikasi kejujuran seseorang menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat dari ketakwaannya kepada Allah, ketidakmudahannya menjual ayat-ayat Allah demi tendensi duniawi dan kepentingan politik belaka serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama dalam kebenaran.⁸⁷ Ibnu Taimiyah mengutip al-Qur'an surat al-Nisa': 58 yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Namun diakui oleh beliau sangat sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi tersebut sekaligus.⁸⁸ Namun yang pasti, harus ada upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena kesejahteraan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemimpin.⁸⁹ Dapat

⁸⁶Abu Hamid al-Ghazāli, *Ihya' 'Ulūm al-dīn*. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), jilid II, h, 68-93

⁸⁷Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dār al-Fikri, tt), h. 15.

⁸⁸Ibnu Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fī al-Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah.tt), h. 16.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 137

diambil kesimpulan bahwa pemimpin tidak cukup hanya bisa memakmurkan masyarakatnya, lebih dari itu pemimpin juga berperan mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya untuk bertaqwa kepada Allah.

6. Kriteria Pemimpin Menurut Ulama Kontemporer

Penguasa ditaati bukan karena jabatan mereka, melainkan karena pelaksanaan syariat yang mereka tegakkan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, ketaatan kepada penguasa merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya, (QS. al Nisa: 59). Allah memerintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan *Ulil Amri* di antara umat Islam.⁹⁰ Meskipun demikian, Sayyid Quthb menyatakan bahwa harus dibedakan antara posisi penguasa sebagai pelaksana syariat dan perpanjangan kekuasaan agama. Ia harus melaksanakan syariat dengan kekuasaannya. Demikian halnya dengan Mohammad Natsir yang mensyaratkan bahwa pemimpin harus cinta pada agama selain berwibawa, amanah, dan cinta tanah air.⁹¹

Karena itu, Abduh menegaskan bahwa rakyat boleh menggulingkan penguasa bila ia bertindak despotik dan tidak adil, serta kesejahteraan rakyat menuntut hal ini.⁹² Mereka (nonmuslim) dilarang untuk memimpin karena memusuhi umat Islam. Ketika entitas kafir itu tidak memusuhi umat Islam dan mereka bersama-sama umat Islam dalam satu entitas negara sebagai warga negara,

⁹⁰Lihat Sayyid Quthb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 124.

⁹¹Lihat Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: DDII, 2001), h. 83-84.

⁹²Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 132-133.

maka mereka dapat dipilih sebagai kepala negara.⁹³ Karena amanah dibutuhkan supaya ia tidak menyimpang dari garis besar ajaran Islam. Karenanya, Natsir juga mensyaratkan cinta kepada agama bagi seorang kepala negara.⁹⁴ Seorang pemimpin (amir/imam) memiliki dua tugas, yakni beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Untuk beribadah diperlukan ilmu dan iman, untuk berkhidmat diperlukan ilmu untuk menyejahterahkan rakyat.

Salah satu prinsip pokok terkait substansi pemerintahan menurut Hasan Al Banna, yaitu: Penguasa bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat, rakyat berhak memonitor tindakan penguasa, menasihati penguasa, dan mengupayakan agar kehendak bangsa dihormati. Beliau menegaskan bahwa pemerintahan konstitusional merupakan sistem paling mendekati pemerintahan Islam. maka negara Islam bisa memiliki banyak bentuk, termasuk demokrasi parlementer konstitusional.⁹⁵ Seorang Muslim dengan kekuatan *leadership* dan amanahnya bisa menduduki jabatan tertinggi meski ilmu agamanya tidak setingkat Ulama. Namun, tidak berarti orang yang buta agama atau bahkan yang sekuler-liberal bisa masuk dalam kriteria diatas. Ringkasnya, pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang bersifat amanah, memperolehnya dengan benar, menunaikan dengan baik, kuat, dapat dipercaya (*āmīn*), pandai menjaga (*hafīd*) amanahnya, dan berpengetahuan (*ālim*) tentang tugas kepemimpinannya.

⁹³ Lihat Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kamilah*, (Beirut: al-Muassah, al-Arabiyah lid-Dirāsah wan-Nasyr, 1972), h. 107-108.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 85.

⁹⁵ Lihat Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 200.

Demikian pernyataan dari para ulama kontemporer bahwa landasan agama menjadi prioritas utama meski tidak sampai setingkat ulama. Karena tanpa landasan agama mekanisme politik yang sehat akan dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk meraih niat dan cita-cita hakiki.

C. Kepemimpinan Karakter Pancasila

a. Pengertian

Sebelum membahas tentang arti kepemimpinan karakter pancasila, ada baiknya kita bahas tentang pengertian kepemimpinan. Berikut adalah pengertian kepemimpinan menurut para ahli

Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi kepemimpinan :

1. George R. Terry (yang dikutip dari Sutarto, 1998 : 17)

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan

2. Ordway Tead (1929)

Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya

3. Rauch & Behling (1984)

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.

4. Katz & Kahn (1978)

Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarah-pengarah rutin organisasi.

5. Hemhill & Coon (1995)

Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goal).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukanya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.

b. Konsep Kepemimpinan Pancasila

Pada dasarnya kepemimpinan di Indonesia adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai pancasila (Kepemimpinan Pancasila). Kepemimpinan pancasila mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kepemimpinannya, baik itu nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Secara lebih terperinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Kepemimpinan Thesis adalah kepemimpinan yang religius dan melaksanakan hal-hal yang harus diperbuat yang diperintahkan Tuhannya, dan menjauhkan diri dari setiap larangan Tuhan dan agamanya. Kepemimpinan ini didasarkan pada sila pertama yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kepemimpinan tipe thesis ini biasanya dimainkan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh religius dan pemimpin yang taat pada aturan agamanya. Ajaran-ajaran agama

menjadi tolak ukur setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin yang seperti ini. Konsep kepemimpinan thesis ini sangat susah diterapkan karena merupakan konsep ideal suatu kepemimpinan, dan merupakan das sein namun das sollennya tidak semua pemimpin mampu mewujudkannya. Kepemimpinan tipe ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya, misalnya islam dengan gaya nabi panutannya yaitu Nabi Muhammad, kemudian Kristen dengan tokoh panutannya yaitu Jesust Crist, serta Hindu dan Budha dengan Dewa yang mereka yakini sebagai tokoh panutan dalam bertindak.

1. Kepemimpinan yang Humanis

Kepemimpinan model ini berdasarkan sila ke-2 pancasila kita yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka setiap tindakan kepemimpinan harus berdasarkan perikemanusiaan, perikeadaban dan perikeadilan. Perikemanusiaan diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Perikeadaban dimaksudkan sebagai nilai-nilai manusia yang beradab, yang memiliki etika sosial yang kuat dan menjunjung tinggi kebersamaan yang harmonis. Kemudian perikeadilan dianggap sebagai perilaku pemimpin yang adil kepada setiap orang yang dipimpinnya, adil bukan berarti sama rata, namun adil sesuai dengan hak dan kewajibannya atau sesuai dengan porsinya. Praktek kepemimpinan model ini juga tidak gampang, perlu pembelajaran dan penghayatan yang mendalam dan harus tertanam dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari para pemimpin model ini.

2. Kepemimpinan yang Unitaris atau Nasionalis

Kepemimpinan yang mengacu pada sila ke-3 ini yaitu persatuan indonesia tidak boleh melepaskan diri dari

nasionalisme yang sehat. Nasionalisme diartikan sebagai kesetiaan tertinggi dari setiap individu ditujukan kepada kepribadian bangsa.

3. Kepemimpinan Demokratik

Kepemimpinan administratif yang mengacu pada sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau dengan kata lain adalah kepemimpinan demokratis pancasila.

4. Kepemimpinan *social justice*

Kepemimpinan yang didasarkan pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan berkeadilan itulah konsep dasar teori ini, adil dalam hal ini bukan sama rata dan sama rasa, namun lebih pada adil yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, harus proporsional, oleh karena itu untuk menerapkan kepemimpinan ini perlu strategi yang tepat untuk mengasah kemampuan membuat suatu kebijaksanaan yang benar-benar bijaksana. Pemimpin yang menganut paham ini harus pandai membaca situasi, harus pandai mencari kearifan dan menemukan hal-hal yang tidak pernah dikemukakan orang lain yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

c. Sumber Kepemimpinan Pancasila

Ada tiga sumber pokok Kepemimpinan Pancasila, yaitu:

1. Pancasila, UUD 1945, dan GBHN
2. Nilai-nilai kepemimpinan universal
3. Nilai-nilai spiritual nenek moyang. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai sumber kepemimpinan Pancasila antara lain berupa :
 1. Nilai-nilai positif dari modernism

2. Intisari dari warisan pusaka berupa nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang ditulis oleh para nenek moyang.
3. Refleksi dan kontemplasi mengenai hakikat hidup dan tujuan hidup bangsa pada era pembangunan dan zaman modern, sekaligus juga refleksi mengenai pribadi selaku "manusia utuh" yang mandiri dan bertanggung jawab dengan misi hidupnya masing-masing.

d. Landasan Kepemimpinan Pancasila

Selanjutnya, pada tingkat, jenjang serta di bidang apa pun, pemimpin harus mempunyai landasan pokok berupa nilai-nilai moral kepemimpinan, seperti yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Keempat macam landasan pokok kepemimpinan itu ialah :

1. Landasan diplomasi (bersumber pada ajaran almarhum Dr. R. Sosrokartono):
 - a) Sugih tanpa banda (kaya tanpa harta benda)
 - b) Nglurung tanpa bala (melurug tanpa balatentara)
 - c) Menang tanpa ngasorake (menang tanpa mengalahkan)
 - d) Weweh tanpa kelangan (memberi tanpa merasa kehilangan)
2. Landasan Kepemimpinan
 - a) Sifat ratu/raja: bijaksana, adil, ambeg paramarta, konsekuen dalam janjinya.
 - b) Sifat pandita: membelakangi kemewahan dunia, tidak punya interest-interest, dapat melihat jauh kedepan/waskita
 - c) Sifat petani: jujur, sederhana, tekun, ulet, blaka
 - d) Sifat guru : memberikan teladan baik.
3. Landasan Pengabdian (Sri Mangkunegara 1)

- a) Ruwangsa handarbeni (merasa ikut memiliki negara)
- b) Wajib melu angrungkebi (wajib ikut bela negara)
- c) Mulat Sarira hangrasa wani (mawas diri untuk bersikap berani)

e. Kriteria Kepemimpinan Politik Adiluhur Pancasila

Ketika ada di antara mereka manusia-manusia yang lebih menonjol dalam hal kepemimpinan, memiliki karakter-karakter mulia yang lebih di antara anak bangsa yang ada, sangat perhatian dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kokoh dalam berketuhanan, mengukir dirinya sedemikian rupa sehingga ia memiliki sifat-sifat mulia, mencintai nusa dan bangsanya, bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, sangat cinta akan persatuan bangsa, memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat Indonesia, dan ia berani mengedepan mengambil tanggungjawab lebih dalam rangka memelihara, dan merawat tanah air, menjaga dan membela falsafah negara dari segala gangguan, dan ia sangat berpegang teguh pada ideologi Pancasila, memahaminya dengan benar, memiliki kesadaran sangat tinggi terhadap nilai-nilainya, paling nyata dalam mewujudkan nilai-nilai luhurnya, maka segenap rakyat Indonesia sudah seharusnya secara bersama-sama, tanpa keraguan, demi membangun kejayaan bangsa dan negara, dengan suara bulat, memohon kepadanya untuk menjadi pemimpin di bumi Pancasila yang kita cintai.

Di sisi lain, saat seorang di antara anak bangsa, yang tidak memiliki karakter-karakter mulia, tidak mempunyai perhatian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, lemah dalam hal ketuhanan, jauh dari sifat-sifat mulia Tuhan, mengabaikan pendidikan dirinya, tidak perhatian terhadap

peningkatan kualitas dirinya baik dari segi spiritualitas, intelektualitas, moralitas dan mentalitas, jauh dari tanda-tanda sebagai manusia yang cinta bangsa dan tanah air, jauh dari sikap dan perilaku adil, sangat mendahulukan kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya, memiliki raport merah dalam karir sosial politik dan ekonominya, tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap masyarakat di mana ia hidup, rendah perhatian terhadap persatuan dan keutuhan bangsa, pernyataan, sikap dan tindakannya sering terindikasi mengedepankan intoleransi dan mau menang sendiri, kesadarannya terhadap bangsa, tanah tumpah darah dan ideologi negaranya sangat diragukan, maka segenap anak bangsa, secara bersama-sama, bersatu padu dan dengan suara bulat hendaknya, menjauhkannya dari kepemimpinan politik di negeri tercinta ini. Manusia jenis ini akan sangat merugikan dan kelak akan membangkrutkan bangsa dan negara secara tidak bertanggungjawab sampai diketahui dengan pasti bahwa ia membangun kualitas dirinya seperti yang diinginkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

f. Tanggung Jawab dan Hak Politik Bangsa

Setiap warga negara bertanggungjawab untuk memajukan negerinya sendiri sesuai kemampuan dirinya. Namun tentu membangun negara diperlukan organisasi dan tata kelola yang baik. Di sini dengan niscaya harus terjadi hirarki kepemimpinan, ada masyarakat yang dipimpin dan ada yang mengambil tugas sebagai pemimpin.

Untuk terjadinya suatu organisasi kepemimpinan dan keterpimpinan di lembaga yang disebut negara ini, diperlukan partisipasi masyarakat warga negara dalam memilih dan dipilih. Ini yang disebut dalam istilah dunia politik sebagai hak politik, yakni hak untuk memilih dan

hak untuk dipilih. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama di dalam suatu negara.

Mereka yang berakal nurani akan memilih pemimpin berdasarkan kesadaran akal nuraninya. Mereka akan memilih pemimpin yang sesuai dengan pilihan akal nuraninya; yaitu pemimpin yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, pemimpin yang aktif, kreatif, produktif, progresif, dan responsif, pemimpin yang punya kepedulian, kemandirian dan kemerdekaan, pemimpin yang berakal nurani.

Namun mereka yang dirinya didominasi oleh libido hewani akan memilih pemimpin yang sesuai dengan naluri hewannya, mereka tidak begitu peduli pada kemajuan bangsa dan negaranya, mereka tidak peduli pada perjuangan dan pengurbanan. Satu-satunya kepedulian mereka adalah keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya sendiri, mereka tak pernah memikirkan kemajuan bangsa ke depan. Setiap bangsa dan negara di mana pun hancur oleh mental-mental warganya yang berlibido hewani.

g. Keterwakilan Politik Ideal dalam Negara Pancasila

Warga negara dalam bahasa lain disebut dengan rakyat. Menjadi tidak mungkin jika dalam setiap mengambil keputusan untuk mengambil suatu kebijakan seluruh warga negara turun dan ikut secara langsung, maka di saat inilah dibutuhkan sistem perwakilan.

Seluruh suara rakyat diwakilkan pada satu kelompok yang dianggap benar-benar dapat mewakili dan menyuarakan aspirasi mereka. Tentu para wakil ini juga berasal dari rakyat pilihan, yaitu mereka yang dianggap memiliki kemampuan menyuarakan mereka. Jika mayoritas warga negara memiliki kesadaran politik yang baik, maka

niscaya mereka yang menjadi wakil rakyat adalah berasal dari yang terbaik di antara mereka. Namun jika mayoritas rakyat bodoh, kesadaran politiknya rendah, pasti pula wakil yang dipilih dan terpilih datang dari warga yang lemah.

Maka itu proses pendidikan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas warga sangat dibutuhkan. Seiring dengan tingginya kualitas warga negara seraya pula kesadaran politik warga menjadi meningkat. Bilamana kesadaran politik warga negara menguat saat itu pula sistem politik, sistem perwakilan dan keterwakilan menjadi bermutu.

Saat itulah kita menemukan bentuk ideal apa yang disebut sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/ perwakilan. Tanpa kesadaran politik warga bangsa yang bermutu, kita tidak akan pernah akan sampai pada sistem politik perwakilan yang ideal.

Suatu kebijakan pemerintahan menjadi bermutu saat lembaga dan pemegang wewenang mendapatkan legitimasi politik dari segenap kekuatan politik. Kekuatan politik didapat dari kekuatan para pelakunya. Para pelaku politik tidak pernah dapat disebut kuat bila kesadaran politik mereka rendah. Lagi-lagi, dibutuhkan warga negara yang sadar politik untuk mendapatkan kekuatan legitimasi politik yang kokoh.

Indikasi bahwa suatu kepemimpinan itu kuat dapat dilihat dari ketulusan para pendukungnya. Warga negara memiliki hati nurani yang dengan nuraninya dapat melihat, mengamati, menilai dan pada akhirnya mendukung seorang calon pemimpin yang memiliki hubungan emosional dengan mereka, pemimpin yang mencintai, memerhatikan, peduli dan melayani mereka. Warga negara, dengan

semakin meningkatnya kesadaran mereka akan nilai-nilai luhur universal Pancasila, dapat membedakan siapakah yang layak dan pantas menjadi pemimpin mereka dan siapakah yang tujuannya tak lain daripada kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya saja.

Lagi-lagi, semakin tinggi kesadaran politik suatu bangsa maka semakin tinggi dukungan mereka, dan semakin rendah kesadaran politik bangsa maka tentu semakin rendah pula dukungan mereka terhadap setiap proses politik yang berlangsung di wilayah negara mereka.

Warga negara yang berkesadaran politik sadar betul bahwa sikap dan kegiatan politik mereka demi kemaslahatan bangsa, negara dan tanah air. Mereka mengedepan mengambil tanggungjawab lebih untuk mengisi pos-pos kepemimpinan, bukan demi kekuasaan politik, tapi demi kepemimpinan politik yang akan membawa bangsa pada kesejahteraan, dan mengangkat negara pada martabat yang tinggi.

Mereka meraih dan menerima jabatan karena memang mereka pantas, memiliki syarat kelayakan, kualifikasi, dan kompetensi untuk menduduki jabatan publik. Mereka mendapatkannya murni atas kehendak dan keinginan rakyat yang juga murni dan tulus mencintai mereka. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin diikat dengan jalinan cinta dan kasih sayang, bukan hubungan jual beli suara, janji-janji manis pada kontestan, dan memaksakan keinginan berkuasa secara berlebihan. Para pemimpin di bumi Pancasila kelak terus bermunculan dari proses dinamika politik yang sehat, perlombaan yang fair, di mana yang paling berkualitas memiliki kepantasan dan kelayakan akan menduduki posisi kepemimpinan dalam masyarakat, dan yang tidak memenuhi syarat

memimpin dengan sendirinya tidak diberi mandat oleh rakyat. Dalam proses politik, warga negara yang berkesadaran Pancasila, telah terpilih dan terpilih, sehingga mereka siap menjadi pemimpin dan rela dipimpin.

Pancasila tak diragukan lagi dapat dikukuhkan sebagai ideologi negara. Secara konsep nilai-nilai luhur universal Pancasila dapat dipertanggungjawabkan di mahkamah akal dan intelektual, secara nilai, Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengganggu nilai-nilai luhur universal setiap agama yang ada di bumi Pancasila.

Ideologi Pancasila disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai asas negara. Negara Indonesia berdasar ketuhanan yang maha esa bukan berdasar salah satu agama yang ada. Setiap pemeluk agama di bawah payung Pancasila merdeka untuk menjalankan nilai-nilai agamanya masing-masing. Negara menjamin, melindungi dan memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap pemeluk agama menjalankan agamanya selama mereka sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Di sisi lain setiap pemeluk agama, baik pemukanya maupun umatnya, harus mendukung program-program negara yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Tak ada alasan logis bagi warga negara yang hidup di wilayah negara Pancasila mempertanyakan keabsahan Pancasila sebagai ideologi negara. Tak ada alasan yang masuk akal bagi warga negara yang tinggal di bumi Pancasila dengan atas nama agama atau golongan memaksakan kehendaknya seolah mereka paling berhak hidup di suatu negara yang dihuni oleh kelompok agama dan keyakinan yang berbeda-beda.

seraya pula berharap semoga bangsa dan negara ini terlindungi dari setiap gangguan dan rongrongan oleh pihak-pihak yang tak henti-hentinya ingin melemahkan dan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa dengan berbagai cara.

D. Sejarah dan Sosial Politik Pemimpin Islam Dahulu dan Sekarang

a. Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Dalam suatu telaah terhadap seratus tokoh berpengaruh di dunia, Muhammad saw diakui sebagai seorang tokoh yang paling berpengaruh dan menduduki rangking pertama. Ketinggian itu dilihat dari berbagai perspektif, misalnya sudut kepribadian, jasa-jasa dan prestasi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam pada waktu yang relatif singkat.⁹⁶

Kesuksesan beliau dalam berbagai bidang merupakan dimensi lain kemampuan sebagai leader dan manajer yang menambah keyakinan akan kebenaran Rasul (Baca: Pengertian Nabi dan Rasul).⁹⁷ Dikatakan leader karena beliau selalu tampil di muka, menampilkan keteladanan, dan kharisma sehingga mampu mengarahkan, membimbing dan menjadi panutan.

Dikatakan manajer karena beliau pandai mengatur pekerjaan atau bekerja sama dengan baik, melakukan

⁹⁶ <https://www.tongkronganislami.net/karakteristik-kepemimpinan-nabi//> . Diakses tanggal 10 November 2017.

⁹⁷ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 33

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنْهَمَ إِذِ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَّحِيمًا

Artinya: "Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul-pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang". (Q.S. An-Nisa:64).⁹⁹

Firman Allah di atas dengan jelas memerintahkan agar setiap umat Islam mematuhi dan taat pada perintah Allah dan Rasulullah. Allah SWT juga menerangkan bahwa setiap Rasul yang diutus oleh-Nya ke dunia ini dari dahulu sampai kepada Nabi Muhammad saw wajib ditaati dengan izin (perintah) Allah karena tugas risalah mereka adalah sama yaitu untuk menunjukan umat manusia ke jalan yang benar dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁰⁰

Diterangkan pula dalam sebuah hadits bahwa Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan setiap orang untuk mentaati pemimpinnya, selama mereka tidak menyuruh

⁹⁹Soenaryo, et.al., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Al-Wa'ah, 1993), h. 129

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz II*, (Semarang, Wicaksana, 1993), h. 211

berbuat maksiat dan kemungkaran terhadap Allah. "Dari Abi Hurairah dari Rasulullah sesungguhnya telah berkata : dia yang taat kepadaku berarti mentaati Allah dan dia yang tidak patuh padaku berarti tidak mentaati Allah. Dan dia yang mentaati Amir berarti mentaati Aku, dan yang tidak mentaati Amir berarti tidak mematuhi aku" (HR. Muslim).¹⁰¹

Baik dari surat An-Nisa' ayat 64 maupun hadits diatas menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin yang harus disandarkan pada izin Allah, ini berarti setiap ketaatan orang pada pemimpinnya, rakyat pada pemerintah dan anak pada orang tua semata-mata karena izin Allah.

Sifat Nabi Muhammad Saw yang harus dijadikan tauladan sebagai pemimpin, yaitu:

1. Kepribadian yang Tangguh

Nabi Muhammad saw. adalah sosok yang sangat kuat baik pada masa kecilnya, dewasanya bahkan sampai wafatnya menunjukkan sikap yang sangat kuat teguh pendirian (istiqamah).

Sejak pertamanya beliau tidak terpengaruh oleh kondisi masyarakat di sekitar yang terkenal kebobrokan dan kejahiliahannya, menyembah berhala dan patung. Kepribadian itulah yang menjadi dasar atau landasan yang kokoh bagi seorang pemimpin, karena hal itu bermakna juga sebagai seseorang yang memiliki prinsip hidup yang kokoh dan kuat.¹⁰²

¹⁰¹Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, (Beirut: darKutul Ilmiah, 1992), h. 1466.

¹⁰²Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 1993), h. 273

2. Kepribadian dan Akhlak Terpuji.

Kepribadian yang terpuji ini memiliki beberapa sifat yang terhimpun dalam pribadi Nabi Muhammad disebut sifat wajib Rasul meliputi shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Bertolak dari sini dapat dikatakan bahwa Rasul (termasuk Muhammad) pasti tidak memiliki sifat-sifat sebaliknya, yang disebut sifat-sifat mustahil - sifat dimaksud yakni kiz'b, khiyanah, kitman dan baladah.

Namun Rasul sebagai manusia pasti memiliki sifat jaiz, yakni sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat atau martabat beliau sebagai utusan Allah. Dalam sifat jaiz ini Rasul tidak dapat menghindari dari ujian dan cobaan Allah SWT. seperti rasa sedih, sabar, dan tabah.

Sifat wajib dan sifat jaiz yang dimiliki Rasul tanpa memiliki sifat mustahil, sangat menunjang pelaksanaan kepemimpinan yang beliau laksanakan. Kondisi itu mengakibatkan kepemimpinan Nabi Muhammad berbeda prinsipil dari kepemimpinan manusia biasa.¹⁰³

Dalam segala hal, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an sebagaimana komentar yang diungkapkan oleh Nasih Ulwan yang dikutip oleh Slamet Untung mengatakan bahwa Muhammad adalah refleksi hidup keutaman Al-Qur'an, ilustrasi dimanis tentang petunjuk- petunjuk Al-Qur'an yang abadi.¹⁰⁴

Dalam rangka menciptakan standar al-akhlakul al-karimah yang tinggi, Muhammad mengajar manusia dengan menggunakan keteladanan dalam keseluruhan metodenya,

¹⁰³ *Ibid.*, h. 276

¹⁰⁴ Slamet Untung, *Muhammad Sang Pendidik*, (Semarang: CV. Pustak Rizky Putra, 2005), h. 75

hal ini dapat dilihat dari seluruh perilaku beliau yang merefleksikan nilai-nilai pendidikan.

Dengan mengambil keteladanan dari kehidupan Nabi saw berkaitan dengan pendidikan akhlak Nabi, beliau sendiri menegaskan dalam salah satu hadits yang sudah dikenal luas dikalangan pengikutnya : "Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak." (H.R. Ahmad).¹⁰⁵

Dari poin ini dapat dipahami bahwa inti dari kepemimpinan pendidikan Nabi Muhammad adalah penanaman dan pengembangan sistem akidah, ubudiyah dan muamalah yang berorientasi pada akhlakul karimah.¹⁰⁶

3. Kepribadian yang Sederhana.

Beliau mengajarkan pada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Ini bukan berarti beliau mengerjakan kemiskinan pada manusia, tetapi beliau menyuruh umat Islam untuk selalu tampil sederhana dengan melakukan sedekah pada orang lain dan saling membantu.

Sikap hidup sederhana Nabi Muhammad saw. beliau tunjukkan dalam hidup sehari-harinya. Entah dalam keadaan damai ataupun perang di antara para pengikutnya atau di antara orang-orang kafir dan musuh-musuhnya, Nabi Muhammad saw. Selalu menjadi teladan.

Beliau memperlakukan orang dengan penuh kesopanan dalam semua kesempatan. Setelah memperoleh kemenangan beliau lebih sederhana, peramah dan pemurah

¹⁰⁵ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz. II* (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 381

¹⁰⁶ Slamet Untung, *op, cit*, h. 76

hati, bahkan memberikan maaf dan pengampunan pada musuh-musuhnya.

Pada masa penaklukan kota Makkah beliau memaafkan hampir semua musuhnya yang telah menganiayanya dan para sahabatnya selama 13 tahun. Bahkan sebagai kepala negara, rutinitas hariannya sangat sederhana dan merefleksikan sikapnya yang rendah hati.

Beliau memperbaiki dan menjahit pakaiannya yang sobek dan menambal sepatunya sendiri. Beliau biasa memerah susu kambing piaraannya dan membersihkan lantai rumahnya yang sederhana.¹⁰⁷ Sikap ini benar-benar menunjukkan betapa sederhananya Nabi dalam hidupnya, meskipun beliau seorang pemimpin besar.

Kepemimpinan Nabi Muhammad saw. berjalan di atas nilai-nilai Islam yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain beroleh bantuan Allah SWT.

Pada titik ini memang layak dimunculkan pertanyaan di mana letak kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Selain memang mendapat petunjuk, bantuan dan perlindungan Allah SWT. Ada beberapa kunci yang dapat diteladani oleh umatnya, yaitu:

- 1) Akhlak Nabi yang terpuji tanpa cela
- 2) Karakter Nabi yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat baja.
- 3) Sistem dakwah yang menggunakan metode imbauan yang diwarnai dengan hikmah kebijaksanaan.

¹⁰⁷Abdul Wahid Khan, *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 75

- 4) Tujuan perjuangan Nabi yang jelas menuju ke arah menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemuliaan duniawi.
- 5) Prinsip persamaan.
- 6) Prinsip kebersamaan.
- 7) Mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut.
- 8) Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta pendelegasian wewenang
- 9) Tipe kepemimpinan karismatis dan demokratis.¹⁰⁸

Keberhasilan Nabi Muhammad saw. dalam memimpin umat dikarenakan tingkah laku beliau yang selalu berdasarkan Al-Quran dan ditunjang beberapa sifat yang melekat padanya. Adapun sifat utama yang melekat pada diri pribadinya yaitu:

- 1) Kehormatan kelahirannya.
- 2) Bentuk dan potongan tubuh yang sempurna.
- 3) Perkataan yang fasih dan lancar.
- 4) Kecerdasan akal yang sempurna.
- 5) Ketabahan dan keberanian.
- 6) Tidak terpengaruh oleh duniawi.
- 7) Hormat dan respek terhadap dirinya.¹⁰⁹

Sudah sepatutnya Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditiru oleh pemimpin-pemimpin Islam di sekarang, sehingga kesuksesan di masa silam dapat diraih kembali.

¹⁰⁸Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 102-105

¹⁰⁹E.K. Imam Munawir, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th.), h. 195.

b. Karakteristik Kepemimpinan Sahabat Nabi Muhammad SAW

1. Kepemimpinan Abu Bakar¹¹⁰

Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah nabi Muhammad saw. wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 M. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khuafah at-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh nabi Muhammad saw. Karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar as-siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan nabi Muhammad saw. dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj.

Abu Bakar memimpin dari tahun 632 M s/d 634 M. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku nabi Muhammad saw. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan.

Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar berkata: "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar: "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin Negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurus kas dan keuangan negara.

¹¹⁰<http://pendidikan60detik.blogspot.co.id/2017/10/kepemimpinan-sahabat-rasulullah-saw.html>

2. Kepemimpinan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 M s/d 644 M. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya suatu ketika khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan (kantor khalifah), karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu.

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu: pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak "Aku akan segera perbaiki jalan itu. Sebab aku takut diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah Swt. nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal". Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi khalifah Umar bin Khattab. Jasa khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharam sebagai Tahun Baru Hijriyah.

3. Kepemimpinan Usman bin Afan

Khalifah Usman bin Afan memerintah selama dua belas tahun atau dari tahun 644 s/d 656 M. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan

Usman bin Afan, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering.

Di masa pemerintahannya, Usman bin Afan melakukan kodifikasi (menyusun atau membukukan) kitab al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 (empat) buah (exemplar). Satu buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaff al-Imam atau Mushaf Usmani, empat buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah dan Kufah. Di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah, dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya.

4. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafurasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah saw., yaitu: Abu Thalib yang selalu membela dakwah nabi Muhammad saw.. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah saw.. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah saw. yang akan pergi hijrah.

Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama lima tahun (656-661 M). Selain pemberani Ali bin Abi Talib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan.

Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang Ilmu Bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya.

c. Ancaman Nabi Saw terhadap Pemimpin Zalim dan Para Pendukungnya¹¹¹

Mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang pemimpin. Kemakmuran atau kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang pemimpin berlaku adil sesuai dengan petunjuk Syariat Islam maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya maka rakyat pun akan berujung pada kesengsaraan.

Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah ta'ala. Sementara pemimpin zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya akan diancam dengan berbagai macam ancaman. Di antara bentuk ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjadi Manusia yang Paling Dibenci oleh Allah Ta'ala

النَّبِيُّ النَّصِيحَةُ فُلْنَا لِمَنْ قَالَ اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنْبِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
Artinya: "Agama itu adalah nasihat." Kami berkata, "Untuk siapa?" Beliau bersabda, "Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, Imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan." (HR. Muslim)

Nasihat secara diam-diam merupakan pilihan awal dalam melawan kemungkaran. Namun ia bukanlah satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan penguasa. Ketika nasihat dengan cara tersebut sudah tidak diindahkan, maka Rasulullah SAW pun memberikan motivasi lain kepada umatnya untuk merubah kemungkaran penguasa. Motivasi tersebut ialah pahala jihad yang dijanjikan kepada umatnya yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim.

Dari Abu Saïd Al-Khudri *Radhiallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

Artinya: "jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zhalim." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Lalu ketika usaha tersebut tidak dihiraukan lagi dan pemimpin tersebut tetap pada prinsipnya yang menzalimi rakyat, maka Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk menjauhi pemimpin tersebut serta jangan sampai mendekatinya, apalagi membenarkan tindakan zalim yang mereka lakukan. Sebab, ketika seseorang tetap mendekati pemimpin zalim tersebut dan membenarkan apa yang dilakukannya maka ia akan terancam keluar dari lingkaran golongan umat Nabi SAW dan ia tidak akan mendatangi telaganya nanti di hari kiamat.

hari itu, ada 3 orang tokoh yang memaparkan tentang dasar negara yakni Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Sukarno.

Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi masih ada proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945.

Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.

Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: "Perwakilan Rakyat").

Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya "Pancasila". Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu

hidup seluruh Rakyat Indonesia, maka Pancasila diterjemahkan dalam butir – butir Pancasila yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa :

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
- Menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab :

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia :

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

**4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan :**

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia :

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Sejarah Perumusan Ideologi Pancasila

Nama Indonesia mulai dipakai untuk menyebut Kepulauan Hindia Belanda pada bulan Maret 1942 pada saat pemerintah Hindia Belanda menyerah pada bala tentara Jepang. Nama Indonesia itu untuk pertama kalinya dahulu dipakai oleh orang Inggris bernama Logan pada tahun 1850, kemudian pada tahun 1884 dipakai oleh Adolf Bastian seorang etnograf. Nama Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani *Indos* dan *nesos* atau dalam bahasa Sanskerta

nusa yang berarti pulau.¹¹² Jepang berusaha mendapat legitimasi untuk kekuasaan atas Indonesia yang mereka duduki. Tanggal 20 Maret 1942 dibentuklah pergerakan tiga A: *Nippon Cahaya Asia*, *Nippon Pelindung Asia*, dan *Nippon Pemimpin Asia*. Inilah ideologi yang hendak dipaksakan orang Jepang pada bangsa Indonesia. Mereka menyanggupi akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Mereka segera menyadari bahwa tanpa Soekarno, M. Hatta dan pemimpin Indonesia lainnya, mustahil akan dapat menguasai rakyat Indonesia. Maka dalam bulan Juli 1942 Soekarno dipindahkan dari tempat pembuangannya ke tanah Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1943 Jepang melancarkan suatu pergerakan rakyat di Indonesia yang disebut Pusat Tenaga Rakyat (Putera).¹¹³ Tujuan Jepang ialah untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaganya untuk membantu Jepang. Empat tokoh Indonesia yang dianggap

¹¹² Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 32-33.

¹¹³ Keberhasilan organisasi Putera, tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin serta tingginya kepercayaan rakyat Indonesia pada para tokoh nasional untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Indikasinya dapat dilihat dari kemajuan organisasi Putera sampai ke berbagai daerah dan kemandirian Putera dalam menjalankan kegiatan operasional tanpa suntikan dana dari pemerintah Jepang. meskipun Putera tidak mampu menghasilkan karya konkrit bagi perjuangan pergerakan nasional namun, dengan adanya Putera mentalitas bangsa Indonesia secara tidak langsung sudah dipersiapkan untuk dapat memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Lihat dalam "Modul Online" http://www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid=107&fname=s_ej204_05.htm, Diakses tanggal 5 November 2017.

paling terkemuka, yang dikenal dengan nama Empat Serangkai, yaitu Soekarno, M. Hatta, K.H. Mansyur, dan pemimpin Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro mendapat kepercayaan untuk memimpin gerakan itu. Tetapi ternyata gerakan Tiga A dan

Putera kurang memuaskan hasilnya.¹¹⁴ Berikut ini adalah peta pembentukan organisasi PUTERA, dengan prinsip Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan perang).¹¹⁵ Sistem ini diterapkan dalam setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah.

Pada tanggal 1 Maret 1944 Putera dibubarkan, dan dibentuklah suatu organisasi yang meliputi semua usaha *tonarigumi* (rukun tetangga) dan *Jawa Hokokai*. Di dalam Jawa Hokokai ditonjolkan sifat berbakti. Pemimpin tertinggi adalah *Gunseikan*, sedangkan Soekarno menjabat sebagai *Komon* (penasihat). Keadaan Jepang pada pertengahan

¹¹⁴ Gerakan Tiga A dalam realisasinya, tidak mampu bertahan lama, karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan bahkan jika boleh mengistilahkan, "masih lebih baik dijajah oleh Belanda daripada dijajah Jepang". Hal tersebut membuktikan kekejaman militer Jepang sulit tertandingi. Ketidaksuksesan gerakan Tiga A, membuat Jepang mencari bentuk lain untuk dapat menarik simpati rakyat. Upaya yang dilakukan adalah menawarkan kerjasama dengan para pemimpin Indonesia untuk membentuk "Putera". melalui Putera diharapkan para pemimpin nasional dapat membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan Sekutu. Lihat, *Ibid*.

¹¹⁵ "Masa Pendudukan Jepang di Indonesia", <http://ariesblog.files.wordpress.com/2010/02/pendudukan-jepang-di-indonesia.ppt>, diunduh tanggal 7 September 2017.

tahun 1944 semakin buruk dan terus menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang diumumkan Perdana Menteri Kaiso tanggal 7 september 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) ke 85. Janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal Kumakhichi Haroda tanggal 1 Maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 kepala pemerintahan Jepang untuk Jawa (*Gunseikan*) membentuk BPUPKI dengan Anggota sebanyak 60 orang yang merupakan wakil atau mencerminkan suku/golongan yang tersebar di wilayah Indonesia. BPUPKI diketuai oleh DR Radjiman Wedyodiningrat sedangkan wakil ketua R.P Suroso dan Penjabat yang mewakili pemerintahan Jepang "Tuan Hchibangase". Dalam melaksanakan tugasnya di bentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia sembilan dan panitia perancang UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumus asas dan dasar degara sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan

Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu, tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan
 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Mr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan lima dasar negara, yaitu sebagai berikut :
1. Paham Negara Kesatuan
 2. Perhubungan Negara dengan Agama
 3. Sistem Badan Permusyawaratan
 4. Sosialisasi Negara
 5. Hubungan antar Bangsa.¹¹⁶
- c. Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut :
1. Kebangsaan Indonesia

¹¹⁶ Mr. Soepomo dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, juga memberikan pemikiran tentang paham *integralistik Indonesia*. Hal ini tertuang di dalam salah satu pidatonya ..., *bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.* Lihat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, http://mjieschool.multiply.com/journal/item/22/Pancasila_Sebagai_Ideologi_Terbuka_PKn_Kelas_XII_Semester_1_Bag_2, diunduh tanggal 17 November 2009.

2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
 3. Mufakat atau demokrasi
 4. Kesejahteraan Sosial
 5. Ketuhanan yang berkebudayaan.¹¹⁷
- d. Panitia Kecil pada Sidang PPKI, tanggal 22 Juni 1945, memberi usulan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹⁸

¹¹⁷ Konsep dasar negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno tersebut, dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu : Sila Kebangsaan dan Sila Internasionalisme diperas menjadi Socio Nationalisme; Sila Mufakat atau Demokratie dan Sila ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu *Gotong Royong*. Lihat, *Ibid*.

¹¹⁸ Panitia kecil mempunyai tugas untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis selama sidang. Rapat Panitia Kecil telah diadakan bersamasama dengan 38 anggota BPUPKI di kantor Besar Jawa Hookookai dengan susunan sebagai berikut; Ketua : Ir. Soekarno, Anggota : 1) K.H.A Wachid Hasjim, 2) Mr. Muhammad Yamin, 3) Mr. A.A. Maramis, 4) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 5) R. Otto Iskandar Dinata, 6) Drs. Mohammad Hatta, 7) K. Bagoes H. Hadikoesoemo. Selanjutnya, dalam sidang yang dihadiri oleh 38 orang tersebut telah membentuk lagi satu Panitia Kecil yang anggota-anggotanya terdiri dari : Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A. Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Ir. Soekarno, Kiai Abdul Kahar Moezakkir, K.H.A. Wachid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, dan H. Agus Salim. Panitia Kecil inilah yang sering disebut sebagai panita 9

Rumusan akhir Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI merumuskan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai hasil refleksi terhadap hidup manusia Indonesia sejak zaman kuno, khususnya dalam hidup masyarakat desa, para pendiri negara kita sampai pada kesimpulan: manusia Indonesia mengakui Tuhan yang satu adanya, entah dengan adanya, entah dengan sebutan Tuhan, Widi, Widi, Wasa, Sang Hyang Hana, Gusti atau Allah. Adanya dunia dengan segala isinya mendorong manusia ke dalam keyakinan: ada suatu realitas, yang tertinggi, yang menjadi sumber adanya seluruh realitas di dunia sebagai sebab yang pertama, sebagai *causa prima*.

Bagaimana orang-orang menghayati keyakinannya, bagaimana mereka bertaqwa, mengabdikan kepada Tuhan, tergantung pada pribadi masing-masing. Maka di Indonesia ada kebebasan beragama. Indonesia bukan negara "teokratis", bukan negara agama yaitu negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan berpemerintahan berdasarkan kekuasaan (*kratia*) Tuhan (*Theos*) menurut ajaran agama tertentu.¹¹⁹ Para pemeluk agama dan para penganut

(sembilan) yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Lihat, *Ibid*.

¹¹⁹ Dengan adanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat agama dan kepercayaan

kepercayaan bebas dalam menghayati dan melaksanakan keyakinan mereka, saling menerima serta saling menghargai dengan penuh toleransi dan dengan semangat kerjasama yang serasi.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Bangsa Indonesia mempunyai gambaran atau citra manusia sendiri. Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi budi dan karsa merdeka, dihargai dan dihormati sesuai dengan martabatnya. Semua manusia adalah sama derajatnya sebagai manusia. Semua manusia sama hak dan kewajibannya. Pada dasarnya manusia dibedakan atas dasar ras, agama, adat atau keturunan atau jenis kelamin. Manusia adalah makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Hal ini disebut untuk mempergunakan istilah Prof. Notonagoro: *monodualitas*. Setiap manusia diharapkan mendapat apa yang menjadi haknya. Maka dirumuskan: "Kemanusiaan yang adil".¹²⁰ Di sini kita

terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya dan tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain. Lihat Achmad Fauzi, *et.al., Pancasila Ditinjau dari Segi Sejarah-Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, cet.III (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, tanpa tahun), h. 93-94.

¹²⁰ Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepa selira", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil

menemukan dasar hak-hak asasi manusia dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Disadari pula bahwa dunia dengan isinya itu merupakan obyek bagi manusia. Dunia ini merupakan obyek bagi pancaindera manusia: bagi mata, untuk dinikmati keindahan alamnya; bagi telinga, dinikmati bermacam-macam suaranya. Manusia dapat menangkap itu semua sehingga timbul getaran-getaran dalam jiwanya, dengan bermacam-macam perasaan.

Apa yang dialami dalam jiwanya dapat diekspresikan dan dimanifestasikan dalam bermacam-macam bentuk kesenian; umpamanya dalam bentuk lagu, tari-tarian, atau lukisan. Tetapi dunia ini terutama merupakan obyek untuk budinya dan karsanya.

Manusia dengan jiwanya yang rohani bersifat transenden, mengatasi struktur dan kondisi alam jasmani. Manusia dapat mengenal hukum-hukum alam dapat menemukan potensi yang terkandung dalam alam; manusia mampu mengolah dan mengubah alam dalam batas-batas tertentu. Transendensinya relatif dan terbatas. Dengan demikian manusia mampu menciptakan kebudayaan. Ia mengolah tanah, air, api dan logam yang didapatnya dalam alam. Hal ini dirumuskan dalam istilah "yang beradab".

3. Persatuan Indonesia

Ketika Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tampil pada sidang paripurna BPUPKI atas permintaan ketuanya, dr. Radjiman Wedyodiningrat, ia menegaskan:

dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Lihat *Ibid.*, h.101-102.

"Saya mengerti apakah Paduka Tuan Ketua kehendaki Paduka Tuan minta dasar, minta *philosophisce grondslag*... Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar KEBANGSAAN.¹²¹ Kita mendirikan satu negara Kebangsaan Indonesia. Tetapi saya minta kepada saudarasaudara, janganlah saudara-saudara salah faham, jikalau saya katakan, bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar KEBANGSAAN. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu *nationale staat*. Bangsa Indonesia, natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "*le désir d'être ensemble*" di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian!"

Persatuan Indonesia atau kebangsaan Indonesia diilhami oleh kata-kata pujangga Empu Tantular pada jayajayanya Majapahit dahulu, yang sekarang tercantum dalam lambang negara; "Bhineka Tunggal Ika": walaupun beraneka ragam adalah satu! Indonesia memang terdiri atas bermacam-macam suku atau kelompok etnik: orang Jawa, Timor, Madura, Batak, Aceh, Bali, Bugis dan seterusnya,

¹²¹ Paham "Bangsa" menurut Ernest Renan (1882) sebagai suatu nyawa atas asas akal terjadi dari dua hal; 1. Rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani suatu riwayat, 2. Rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Lihat "Pemikiran Sosial Soekarno", <http://tonytampake.files.wordpress.com/2008/04/pemikiran-sosial-soekarno.ppt>, diunduh tanggal 7 September 2019.

silas II ini tidak boleh lepas dari silas III. Artinya, silas Kebangsaan atau Persatuan Indonesia dijiwai oleh silas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; kebangsaan yang ingin berhubungan secara serasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sejak dahulu, bahkan pada zaman Majapahit (1293-1517) orang mengenal adat kebiasaan cara khusus mengadakan perundingan, yang disebut "musyawarah untuk mufakat". Cara melakukan segala sesuatu bersama di desa-desa Indonesia juga terungkap dalam prosedur, yang ditempuh oleh para sesepuh dalam mengambil keputusan. Pada umumnya di Nusantara orang mengenal musyawarah. Setiap anggota sidang dapat berbicara, setiap orang berhak agar gagasannya didengarkan dan bahwa orang lain juga harus memperhitungkannya. Setelah mengadakan pembicaraan, timbang-menimbang maka akhirnya diambil keputusan. Dalam keputusan itu tak tercantumkan keinginan siapa saja dan tak seorang pun boleh memaksakan kehendak pribadinya. Dalam musyawarah dan memutuskan secara bersama-sama, kepala desa memegang pimpinan. Keputusan terakhir disebut mufakat yaitu konsensus, kesepakatan bersama.¹²⁴ Jadi keputusan

kebangsaan yang sejati dalam arti luas, tidak dengan paham kebangsaan yang sempit. Lihat Nurcholish Majid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h 69-70.

¹²⁴ Dengan Silas Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu

dapat tampil sebagai pemenang yang unggul dalam perdebatan. Musyawarah untuk mufakat merupakan suatu metode dengan tukar pikiran, menyumbangkan gagasan-gagasan berusaha untuk bersama-sama dapat menemukan kebenaran dan kebaikan.

Dalam musyawarah orang boleh saja adu argumentasi dan berdiskusi. Hal ini oleh Sukarno dikemukakan juga ketika ia berbicara tentang asas musyawarah mufakat dalam sidang paripurna BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal dengan sebutan "Lahirnya Pancasila":

"Dalam perwakilan, nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada suatu *staat* yang hidup betul-betul jikalau dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya."

Demokrasi Indonesia memang tidak mengenal oposisi, dalam arti kelompok atau partai yang *a priori* menentang pendirian orang yang sedang berkuasa. Tetapi perbedaan pendapat mempunyai tempat dalam demokrasi Pancasila.¹²⁵ Orang boleh saja mengemukakan pendapat dan pendiriannya yang berbeda dengan pendapat orang yang berkuasa, asal caranya menurut aturan permainan yang benar. Dalam perundingan orang jangan menuruti

¹²⁵ Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi Indonesia yang merupakan system penyelenggaraan Negara meliputi penyelenggaraan pemerintah Negara dan penyelenggaraan pembangunan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam seluruh aspek kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lihat "RUU TAP MPR tahun 1998 tentang Demokrasi Pancasila", pada konsideran menimbang, <http://www.mpr.go.id>, diunduh tanggal 12 September 2017.

emosinya atau jangan memaksakan kehendaknya sendiri, melainkan supaya berbicara dengan bijaksana. Kebebasan memang dijunjung tinggi, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Di dekat kota Palembang ada sebuah batu dengan prasasti "Kedukan Bukit" (683). Menurut Prof. Muhammad Yamin batu itu merupakan peninggalan *Gründungsakt* kerajaan Sriwijaya.

Tulisannya berbunyi: "*Marwuat wanua Sriwijaya jaya siddhayatra subbiksa*". Oleh M. Yamin diterjemahkan: "Mereka mendirikan negara Sriwijaya agar jaya sejahtera sentosa". Jadi negara Sriwijaya didirikan bukan untuk keagungan dinasti Syailendra, melainkan untuk kesejahteraan rakyatnya.¹²⁶ Kata *siddhayatra* adalah

¹²⁶ Dengan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian pula juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan

102

“sejahtera” dalam bahasa Indonesia. Ideologi Pancasila jelas bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Prof. Djojodiguno menulis:

“Kita ini rakyat yang terikat secara sosial dan tradisional; kita masing-masing bertindak atau bertingkah laku seperti semua orang lain, tiap orang bersifat komunal.”

Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara, hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika merubah dasar negara Pancasila sama dengan membubarkan negara hasil proklamasi (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966)

c. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*dasar filsafat negara*) dan ideologi negara.¹²⁷ Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Konsep-konsep Pancasila tentang kehidupan bernegara yang disebut cita hukum (*staatsidee*),¹²⁸ merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam

yang merata dan keadilan sosial. Lihat, hal. Achmad Fauzi, *et.al.*, *op.cit.*, h. 125-126.

¹²⁷ Lihat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, *loc.cit.*

¹²⁸ Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lihat makalah Jimly Asshidiqqie, “Ideologi, Pancasila dan Konstitusi”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc -, diunduh tanggal 15 September 2017.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut meskipun tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila.¹³¹ Dengan demikian Pancasila dapat disebut sebagai dasar falsafah negara. Pancasila sebenarnya juga tersirat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menyimpulkan, mengandung dasar-dasar negara Pancasila antara lain ialah:

- 1) Pasal 29 ayat (1) menentukan: "Negara berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa".¹³² Ketentuan Pasal ini adalah sesuai dengan dan mengenai sila kesatu dari Pancasila yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa.
- 2) a. Pasal 24 ayat (1) menentukan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".
b. Pasal 27 ayat (1) menentukan: "Segala warga negara bersamaan dengan hukum dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

kesatuan (totalitas). Lima-limaning atunggal. Bukannya bercerai-berai di mana sila yang satu terpisah dengan sila yang lain. Lihat S. Suryontoro, *Dasar-dasar Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 29.

¹³¹ Kelima sila tersebut menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Naskah P4 Bab II alinea pertama disebut Pancasila. Lihat C. S. T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1992) h. 2.

¹³² Lihat Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl 29 ayat (1).

c. Pasal 27 ayat (2) menentukan: "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) ini adalah berkenaan/berhubungan dengan perikemanusiaan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 adalah sesuai dengan dan

mengenai sila kedua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Pasal 1 ayat (1) menentukan: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Ketentuan ini pasal ini adalah sesuai dengan dan mengenai sila ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia.

4) Pasal 1 ayat (2) menentukan: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Pasal 2 ayat (1) menentukan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan dan mengenai sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

- 5) Bab XVI berjudul : "Kesejahteraan Sosial" dan memuat 2 pasal berikut:
- a. Pasal 33 menentukan:
 - 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
 - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
 - 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 34 menentukan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Ketentuan-ketentuan dalam Bab XIV UUD 1945 ini adalah sesuai dengan dan mengenai sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa antara Pembukaan dan isi UUD 1945 mempunyai pertalian yang erat dan seluruh isi UUD 1945 dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, masing-masing sila dari Pancasila mempunyai pertalian bahkan menjiwai ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dari UUD 1945.

F. Islam, Komunis Dan Pancasila¹³³

Sejarah perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia mencatat satu babak tentang perebutan

¹³³ Adian Husaini (Ketua Program Doktor Pendidikan Islam – Universitas Ibn Khaldun Bogor). <http://m.republika.co.id/berita/koran/islamia/15/09/17/nut1w616-islam-komunis-dan-pancasila>. Diunduh 20 September 2017.

BAB IV

AKTUALISASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PANCASILA

A. Menyeimbangkan Tiga Kualitas Kecerdasan Dasar Kepemimpinan

Menjadi sukses, tentu saja merupakan impian setiap orang. Di antara cara menjadi sukses adalah tidak hanya dengan meningkatkan kecerdasan intelektual saja, namun juga mengasah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Bagaimana agar ketiga kecerdasan itu dapat memberikan pengaruh terhadap kesuksesan kita?

a. Kecerdasan Intelektual

Kualitas seorang pemimpin dimulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu kualitas intelektual. Seorang pemimpin wajib mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, perencanaan, dan keberanian untuk bertindak terhadap semua kewajibannya.

Pemimpin tidak hanya harus memperlihatkan gaya dan penampilan fisik yang luar biasa, tapi dia juga harus mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membuat dirinya mampu bekerja dengan cerdas dan tegas.

Kecerdasan intelektual atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan kecerdasan yang dibangun oleh otak kiri. Kecerdasan ini mencakup kecerdasan linear, matematik, dan logis sistematis. Kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Orang dengan kecerdasan ini akan mampu memiliki analisis yang tajam dan memiliki

kemampuan untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Namun, kecerdasan intelektual tidak melibatkan emosi dalam memproses informasi.

Kecerdasan intelektual adalah kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Intelektual lebih difokuskan kepada kemampuannya dalam berpikir seseorang. Kemampuan intelektual ini dapat diukur dengan suatu alat tes yang biasa disebut IQ (*Intelligence Quotient*). IQ adalah ekspresi dari tingkat kemampuan individu pada saat tertentu, dalam hubungan dengan norma usia yang ada.

Ada tiga indikator kecerdasan intelektual yang menyangkut tiga domain kognitif. Ketiga indikator tersebut adalah:

- a. Kemampuan figur yaitu merupakan pemahaman dan nalar dibidang bentuk
- b. Kemampuan verbal yaitu merupakan pemahaman dan nalar dibidang bahasa
- c. Pemahaman dan nalar dibidang numerik atau yang berkaitan dengan angka biasa disebut dengan kemampuan numerik.

Dunia kerja erat kaitannya dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Seorang pekerja yang memiliki IQ tinggi diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki IQ lebih rendah. Hal tersebut karena mereka yang memiliki IQ tinggi lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan sehingga kemampuannya dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya akan lebih baik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang karyawan yang mendapatkan skor tes IQ yang tinggi pada saat seleksi ternyata menghasilkan kinerja yang lebih baik, terutama apabila dalam masa-masa tugasnya tersebut ia sering mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dari pelatihan yang dilakukan.

b. Kecerdasan Emosional

Setelah kualitas kecerdasan intelektual sudah dikuasai dengan baik, pemimpin harus mempersiapkan dirinya dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sangat diperlukan untuk membangun kerjasama yang harmonis dalam organisasi, termasuk untuk meningkatkan kualitas sikap baik kepemimpinan di semua aspek kerja organisasi. Untuk itu semua, pemimpin perlu memiliki kesadaran diri yang kuat dan yang penuh empati terhadap orang lain dan lingkungan organisasi.

Pemimpin harus memiliki emosional untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai positif. Pemimpin harus membangun hubungan manajemen yang saling menguntungkan dan yang saling berkontribusi. Pemimpin harus memiliki kesejahteraan emosional dan kesejahteraan fisik dalam kondisi dan situasi apapun. Pemimpin harus memiliki optimisme terhadap semua tugas dan tanggung jawab. Pemimpin harus memiliki keterampilan untuk mengatasi semua gejolak emosi berdasarkan pengalaman yang ada dan selalu memiliki kreatifitas untuk memperbaiki keadaan.

Kecerdasan emosional menjadikan seseorang mampu mengelola emosi dan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain. Termasuk di antaranya kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi pribadi, dan kemampuan berinteraksi sosial.

Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik mampu secara tepat mengelola ekspresi wajah seperti tersenyum cemberut, gembira dan sedih, serta mampu mengatur volume dan intonasi suara sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan.

Penerapan kecerdasan emosional dapat menjadi salah satu cara menjadi sukses jika diterapkan dalam empat aspek kecerdasan emosional, yaitu:

1. Kesadaran Diri

Kesadaran diri tidak hanya tentang mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri saja, tapi juga mampu memahami pemikiran dan perasaan orang lain dan menjadikannya pertimbangan dalam membangun strategi yang baik. Kesadaran diri yang baik, secara lebih lanjut dapat mempengaruhi pandangan lawan bicara atau klien secara positif terhadap sesuatu yang ditawarkan.

2. Pengaturan Diri

Semakin Anda memahami apa yang Anda rasakan dalam berbagai macam kondisi, Anda akan semakin mampu mengelola emosi Anda dan memberikan respon secara tepat dalam berbagai kondisi yang anda hadapi.

Mengelola emosi berbeda dengan menahan emosi. Berinteraksi dengan orang lain menggunakan senyum palsu tidak dapat dikatakan sebagai pengelolaan emosi. Mengelola emosi adalah meningkatkan kepekaan terhadap kata hati, menunda kenikmatan untuk meraih sasaran yang diharapkan, serta kemampuan untuk pulih dari tekanan emosi yang dirasakan.

3. Empati

Empati kadangkala disebut sebagai kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Dengan adanya empati, seseorang dapat terhubung dengan orang

lainnya. Di samping itu, memiliki empati juga membantu anda untuk mengantisipasi perubahan emosi orang lain.

Pada dasarnya, empati merupakan sesuatu yang dapat dilatih dengan meningkatkan interaksi dan membaca kondisi emosi dari orang-orang yang berada di sekitar Anda. Salah satu cara berlatih memahami perasaan orang lain adalah dengan mengkonfirmasi pemahaman anda dengan menanyakan langsung kepada orang tersebut.

4. Keterampilan Sosial

Setelah Anda menguasai tiga aspek kecerdasan emosional tersebut, Anda akan memiliki keterampilan untuk menyikapi seseorang dengan cara yang lebih baik. Keterampilan sosial dapat dilatih dengan meningkatkan rasa ingin tahu terhadap alasan seseorang melakukan sesuatu, mempercayai maksud baik yang dimiliki orang lain, dan terbuka terhadap perasaan dan pemikiran orang lain.

Meskipun tidak selamanya lawan bicara anda memiliki keterampilan sosial yang sama, atau kadangkala Anda bisa saja menemukan orang yang hanya mencari keuntungan saja, namun memiliki pikiran positif terhadap orang lain membuat Anda menjadi orang yang lebih baik.

c. Kecerdasan Spiritual

Selanjutnya, pemimpin wajib meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual untuk memperkuat daya tahan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan ketidakpastian dalam kehidupan. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk melakukan evaluasi atas kejujuran dan integritas diri sendiri terhadap kehidupan. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk mengembangkan ide-ide

kepemimpinan dalam tanggung jawab buat keselamatan semua pihak. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk melakukan penilaian atas semua keadaan melalui wawasan dan kreatifitas yang terfokus kepada sumber kebaikan. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk melakukan pemecahan masalah melalui intuisi dan logika berpikir yang fokus pada kebenaran. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk menjalankan inspirasi, visi, komitmen dan motivasi melalui ketahanan diri yang solid dalam kepercayaan diri yang menikmati semua aliran proses kerja dengan bahagia.

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan mengerti dan memberikan makna spiritual atas kehidupan Anda. Dengan memiliki kecerdasan spiritual yang baik, Anda akan lebih mampu menghadapi berbagai persoalan yang Anda alami. Kecerdasan spiritual juga membuat Anda menjadi orang yang memiliki tekad, semangat, keyakinan, dan memiliki kepribadian yang positif dan jujur.

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik mampu bersikap tenang dan mengambil keputusan secara bijak yang didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu, dengan kecerdasan spiritual yang baik, seseorang akan memiliki tekad yang kuat sehingga memiliki keberanian untuk melawan arus atau tradisi selama hal itu sejalan dengan apa yang menjadi keyakinannya. Mereka juga berani mengambil risiko karena kesabaran dan keteguhan hati yang diiringi kepercayaan kepada Tuhannya.

Seorang pemimpin atau manager dengan kecerdasan spiritual yang tinggi akan menyenangkan bagi karyawannya karena memiliki kesadaran yang tinggi terhadap diri dan

lingkungannya, memiliki sifat sabar dan tenang, serta tidak bersikap sombong atau arogan.

Kecerdasan spiritual sebagai rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang laku dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasannya, juga memungkinkan kita bergulat dengan ihwal baik dan jahat, membayangkan yang belum terjadi serta mengangkat kita dari kerendahan. Kecerdasan tersebut menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bernilai dan bermakna.

Kecerdasan spiritual muncul karena adanya perdebatan tentang IQ dan EQ, oleh karena itu istilah tersebut muncul sebab IQ dan EQ dipandang hanya menyumbangkan sebagian dari penentu kesuksesan seseorang dalam hidup. Ada faktor lain yang ikut berperan yaitu kecerdasan spiritual yang lebih menekankan pada makna hidup dan bukan hanya terbatas pada penekanan agama saja. Peran SQ adalah sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Seseorang yang memiliki SQ tinggi adalah orang yang memiliki prinsip dan visi yang kuat, mampu memaknai setiap sisi kehidupan serta mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan kesakitan.

Kecerdasan spiritual mempengaruhi tujuan seseorang dalam mencapai karirnya di dunia kerja. Seseorang yang membawa makna spiritualitas dalam kerjanya akan merasakan hidup dan pekerjaannya lebih berarti. Hal ini mendorong dan memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimilikinya, sehingga dalam

karir ia dapat berkembang lebih maju. Kecerdasan spritual yang dimiliki setiap orang tidaklah sama. Hal tersebut tergantung dari masing-masing pribadi orang tersebut dalam memberikan makna pada hidupnya. Kecerdasan spritual lebih bersifat luas dan tidak terbatas pada agama saja. Perbedaan yang dimiliki masing-masing individu akan membuat hasil kerjanya pun berbeda.

Kecerdasan spiritual dapat diasah dan ditingkatkan dengan beberapa cara, di antaranya dengan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama, melakukan perenungan terhadap berbagai peristiwa kehidupan, mengenali tujuan hidup dan tantangan yang dihadapinya, menumbuhkan kasih sayang, meningkatkan kepekaan terhadap intuisi, serta dengan melayani orang lain dengan sikap rendah hati.

d. Pengaruh ESQ terhadap Kepemimpinan

Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin maka makin kuat pula yang dipimpin.

Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaanya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka jika ingin menjadi pemimpin yang baik jangan pikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu. Tidak akan bisa mengubah orang lain dengan efektif sebelum merubah diri sendiri. Bangunan akan bagus, kokoh, megah, karena ada

pondasinya. Maka sibuk memikirkan membangun umat, membangun masyarakat, merubah dunia akan menjadi omong kosong jika tidak diawali dengan diri sendiri. Merubah orang lain tanpa merubah diri sendiri adalah mimpi mengendalikan orang lain tanpa mengendalikan diri.

Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah pemimpin yang mampu mengendalikan diri, sabar, tekun, tidak emosional, tidak reaktif serta positive thinking. Untuk memperoleh EQ ini, seseorang harus melalui pendidikan sejak dini dengan contoh suri tauladan dari kedua orangtuanya. Pemimpin dengan EQ yang tinggi, ia tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, lebih mengutamakan rasio daripada emosi, tidak reaktif bila mendapat kritik, tidak merasa dirinya pandai dan paling benar serta tawadlu (rendah hati) atau *low profile*. dan mempunyai sikap terbuka, transparan, akomodatif, konsisten (istiqomah),

Perkembangan EQ berhubungan erat dengan perkembangan kepribadian (personality development) dan kematangan kepribadian (maturity of personality). Pemimpin dengan kepribadian yang matang (mature), dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan atau pekerjaan menggunakan kecerdasan intelektualnya (IQ) dan kecerdasan emosionalnya (EQ) secara proporsional.

Pemimpin dengan tingkat kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi adalah pemimpin yang tidak sekedar beragama, tetapi terutama beriman dan bertaqwa. Seorang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa-apa yang diucapkan diperbuat bahkan isi hati atau niat manusia. Pemimpin dapat membohongi rakyatnya tetapi

tidak dapat membohongi Tuhannya. Selain daripada itu pemimpin yang beriman adalah seseorang yang percaya adanya Malaikat, yang mencatat segala perbuatan yang baik maupun yang tercela dan tidak dapat diajak kolusi. Tipe pemimpin ini tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram dan mana yang melanggar hukum dan mana yang sesuai dengan hukum.

Unsur SQ sangat penting bagi seorang pemimpin sebab pemimpin yang memiliki SQ atau kecerdasan spiritualnya tinggi akan membuat keberadaan dirinya bermanfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya memanfaatkan orang lain. Pada hakekatnya seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya bukan oleh orang yang memberi amanah tetapi terutama tanggung jawab kepada Allah Swt.

B. Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Paling tidak ada empat kata yang harus menjadi perhatian kita kalau membicarakan *good and clean governance*, yaitu (1) *good government*, (2) *clean government*, (3) *good governance*, dan (4) *clean governance*. Dari empat pembagian tersebut dilihat bahwa yang menjadi perhatian adalah *good* (baik), *clean* (bersih), *government* (pemerintahan), dan *governance* (penyelenggara pemerintahan). Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian *government* lebih memberikan perhatian terhadap sistem, sedangkan *governance* lebih memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia yang bekerja dalam sistem tersebut. Tanpa

menjaga keseimbangan terhadap dua hal ini akan muncul ketimpangan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran terhadap sistem bernegara.¹⁴⁵

Pengabaian terhadap *good governance* telah menjadi penyebab terhadap krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia. Krisis ini meluas menjadi ekonomi, sosial dan politik. Bahkan kemudian *meruyak* kepada krisis kepercayaan publik yang amat parah. Menurut Wanandi (1998) krisis ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum, kebijakan publik yang tidak transparan serta absennya akuntabilitas publik akhirnya menghambat pengembangan demokrasi dalam masyarakat.¹⁴⁶

Tanpa membedakan secara tajam antara empat elemen penting tersebut, Wanandi (1998) memberikan pengertian sebagai berikut : "kekuasaan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kekuasaan juga harus didasarkan atas aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua

145

Saldi

Isra

dalam

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/254-menciptakan-pemerintah-yang-baik-dan-bersih-di-daerah.html>, diunduh 17, November 2017.

¹⁴⁶ Jusuf Wanandi, (1998), *Good Governance dan Kaitannya Dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan : Agenda Masa Depan*, dalam *Jurnal CSIS*, Tahun XXVII. No. 3, Jakarta, 2998.

warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum".¹⁴⁷

Sementara itu, Riswanda Imawan (2000) berpendapat bahwa *clean government* adalah satu bentuk atau struktur pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya *abuse of power*. Untuk itu diperlukan (1) pemerintah yang dibentuk atas kehendak orang banyak, (2) struktur organisasi pemerintah yang tidak kompleks (lebih sederhana), (3) mekanisme politik yang menjamin hubungan konsultatif antara negara dan warga negara, dan (4) mekanisme saling mengontrol antar aktor-aktor di dalam infra maupun supra struktur politik.¹⁴⁸

Ada beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut :

1. Akuntabilitas

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 akuntabilitas diartikan sebagai berikut : "adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban setiap proses dan hasil

¹⁴⁷*Ibid.*

¹⁴⁸ Riswanda Imawan, *Formulasi dan Analisis Kebijakan Publik Daerah*, Makalah Disampaikan di DPRD Sumatra Barat, Maret, Padang, 2000.

akhir penyelenggaraan negara. Menurut Willian C. Johnson (1998) pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dalam berbagai sifat atau cara. *Pertama*, bersifat internal-formal dilakukan dalam bentuk (1) *executive control*, (2) *budget preparation and management*, (3) *rule-making procedures*, (4) *inspector general and auditors*, (5) *chief financial officers*, dan (6) *investigative commission*. *Kedua*, external-formal dilakukan dalam bentuk (1) *legislative oversight*, (2) *budgetary review and enactment*, (3) *legislative rule-making*, (4) *legislative veto*, (5) *legislative investigation*, (6) *legislative casework*, (7) *legislative audits*, (8) *ratification and appointments*, (9) *judicial review and takeover*, (10) *intergovernmental controls*, dan (11) *electoral process*. *Ketiga*, external-informal dilakukan dalam bentuk (1) *monitoring by interest/ clientele groups*, (2) *professional communities*, (3) *informational media*, dan (4) *freedom of information law*. *Keempat*, internal-informal dilakukan dalam bentuk (1) *professional standars*, (2) *ethical codes and values*, dan (4) *whistle-blowers*.¹⁴⁹

Munculnya beberapa sifat atau cara dalam melakukan pertanggungjawaban karena ada anggapan bahwa satu sarana saja dirasakan tidak memadai untuk dapat mengenal secara pasti kegiatan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Misalnya pendirian komisi Ombudsman adalah salah satu usaha untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan yang bersifat *external-informal*.

¹⁴⁹ Johnson, William C., *Public Administration : Policy, Politics, and Practice*, Brown and Benchmark, 1998.

2. *Transparans*

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 tahun 1999 prinsip transparan diartikan sebagai berikut : "asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara".

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan negara. Ini adalah peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Secara lebih jelas peran serta masyarakat ini ditentukan dalam PP No. 68 Tahun 1999. Dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
- b. Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.

Penggunaan hak dalam butir a, b dan c tersebut rakyat mendapat perlindungan hukum. Untuk itu semua, menurut ketentuan Pasal 3 dan 4 dalam mempergunakan hak tersebut rakyat berhak mempertanyakan langsung kepada instansi terkait atau komisi pemeriksa. Hal itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Penyampaian itu dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Kalau dibandingkan dengan negara lain yang telah

lama memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Indonesia masih agak tertinggal karena pada negara tersebut akses informasi masyarakat (*public access to information*) terhadap penyelenggaraan negara diakui dengan undang-undang atau *information act*. Dibandingkan dengan PP, pengaturan dengan UU tentu mempunyai kewibawaan yang lebih tinggi untuk dipatuhi.

3. Partisipasi

Pengertian ini tidak ditemui dalam UU No. 28 Tahun 1999, tetapi kalau dipahami misi UU No. 22 Tahun 1999 maka partisipasi masyarakat adalah hal yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan agak ringkas Sukardi (2000) menterjemahkan partisipasi sebagai upaya pembangunan rasa keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat ini adalah upaya melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam teori pengambilan keputusan semakin banyak partisipasi dalam proses kelahiran sebuah *policy* maka dukungan akan semakin luas terhadap kebijaksanaan tersebut (Dunn, 1997). Bahkan David Osborne dan Ted Gaebler (1996) menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya berperan sebagai katalis. Hal ini dapat dipahami karena kecenderungan ke depan pemerintah yang mempunyai peranan terbatas dapat mempercepat pembangunan masyarakat.

4. Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum dapat ditemui dalam Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan : "adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan

keadilan dalam setiap pelaksanaan "penyelenggaraan negara".

Prinsip keempat ini mengarahkan agar penyelenggara negara bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (taat asas). Kepatuhan terhadap norma hukum adalah bukti bahwa adanya keinginan untuk menegakkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal kalau keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak didukung dengan penghormatan terhadap norma hukum yang telah disepakati sebagai kaedah landasan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah prinsip yang harus dipelihara. Bagaimana menumbuhkan etos *good governance* tersebut ? Sebaiknya dimulai dari sikap individu penyelenggara negara.

Hampir sama dengan uraian di atas, UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah meliputi :

1. Partisipasi

Setiap orang atau setiap warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas dari rakyat perlu diobangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (Rule of Law)

Aturan hukum dan perundang-perundangan haruslah menganut asas keadilan, harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu dan dipatuhi oleh rakyat secara utuh

(impartially), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.

3. Transparan

Transparan harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan oleh pemerintah secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)

5. Berorientasi konsensus (consensus orientation)

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

6. Berkeadilan (equity)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya

7. Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (accountability)

Para pengambil keputusan dalam pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksterna;

9. Bervisi strategis (strategic vision)

Para pimpinan dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

10. Saling keterkaitan (interrelated)

Keseluruhan ciri atau karakteristik dari good governance diatas saling memperkuat dan saling terkait (mutually reinforcing) dan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, apabila informasi mudah diakses, berarti transparansi pemerintah semakin baik, tingkat partisipasi semakin luas dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Berdasarkan latar belakang teori dan kebijakan yang diberlakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, secara mendasar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tersebut diatas bersifat universal, dapat diberlakukan di negara manapun di dunia ini dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kontribusi Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Pancasila

Dalam uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa agama Islam tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Karena nilai-nilai Islam sedemikian kohesif dan terserap dalam ideologi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa (QS. Al Ikhlas: 1), Kemanusiaan (QS. Al Insaan: 8-9), Nasionalisme

(QS. Al Hujurat: 13), Demokrasi Musyawarah (QS. As Syuro: 38), dan Keadilan Sosial (Adz Dzaariyaay: 19).

Dalam bagian ini akan diuraikan subyek pembahasan yaitu bagaimanakah akseptabilitas ajaran Islam terhadap Ideologi Pancasila? Dan bagaimanakah kontribusi pemikir Islam terhadap Ideologi Pancasila?

a. Akseptabilitas Ajaran Islam terhadap Ideologi Pancasila

Agama-agama yang berkembang di Indonesia mulai sejak zaman nusantara (proto nasionalis) hingga zaman digital sekarang ini (nasionalisme modern) telah berakulturasi dengan kebudayaan rakyat pribumi. Islamisasi di Indonesia tidaklah melalui penaklukan militer, pertumpahan darah, ekspansi radikal. Melainkan melalui jalur dakwah yang damai, pernikahan, sufistik, atau paling banter melalui jalur perdagangan. Inilah yang kemudian disebut sebagai Islam Nusantara.

Sebagai konsep prismatic, menggabungkan beberapa keutamaan nilai ke dalam suatu konsep baru nan utuh, ideologi Pancasila tidak dapat dipungkiri mendapatkan inspirasi luhurnya dari ajaran agama Islam, di samping agama-agama lain, pemikiran Barat, tradisi lokal pribumi. Para ulama (Wali Songo yang datang dari Timur Tengah) kemudian, menjadikan kebudayaan sebagai medium untuk menyampaikan esensi ajaran Islam.

Wayang dijadikan perangkat untuk dakwah, bedug digunakan untuk menambah kesan estetis sebelum adzan, barazanji digunakan sebagai pujian kepada Nabi Muhammad Saw, Maulid dirayakan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad Saw, dan banyak lagi perangkat-perangkat kebudayaan lokal yang digunakan demi terserapnya nilai-nilai Islam.

Berbeda dengan ajaran dakwah fundamentalis yang kaku, terkesan dekultrasi, dan dogmatis, Islam Nusantara justru berbaur dengan kebudayaan masyarakat pribumi, selama tidak bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Sistem organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, bahasa, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, hingga kesenian digunakan demi tersalurkannya ajaran Islam. Para Ulama paham betul mengenai sosiologi dakwah.

Puncak penggunaan kebudayaan sebagai medium dakwah adalah disepakatinya Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebagian anggota BPUPKI selaku pendiri bangsa dan perumus Pancasila berlatar belakang ulama, baik itu ulama Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Masyumi, dan yang lainnya. Pancasila merupakan produk kebudayaan. Dengan mengamalkan Pancasila, disaat yang bersamaan kita telah mengamalkan esensi dari ajaran-ajaran agama, termasuk agama Islam, yaitu Monotheisme, Kemanusiaan, Persaudaraan, Musyawarah, dan Penegakan keadilan sosial.

b. Kontribusi Pemikir Islam terhadap Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan produk kebudayaan, suatu kesepakatan luhur pendiri bangsa antara para ulama yang melek pengetahuan intelektual modern (Wahid Hasyim, Agus Salim, dan lainnya) dan para intelektual yang melek pengetahuan agama (Soekarno, Hatta, dan lainnya). Titik temu pengetahuan agama dan intelektual modern kemudian melahirkan Pancasila sebagai *common platform*, *qalimatun sawa*, *modus vivendi*, *leit star*, dan Dasar Negara. (Latif, 2011).

Adapun kontribusi para ulama atau pemikir Islam terhadap Ideologi Pancasila adalah ditempatkannya Sila

Ketuhanan yang Maha Esa sebagai Sila Pertama untuk menggantikan rumusan Pancasila Soekarno yang menempatkannya pada sila kelima. Penempatan ini begitu signifikan mengingat Sila Ketuhanan sebagai fundamen moral dari sila-sila lainnya. Keempat sila berikutnya, kata Hatta, merupakan fundamen politik yang hanya dapat kokoh jika berdiri di atas fundamen moral Sila Ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila. Dengan begitu, Pancasila mendapati legitimasi Ilahiah. Bahwa kita berlaku manusiawi, bersikap nasionalis, bertindak demokratis, dan berkeadilan sosial, semata karena kedudukan kita yang setara sesama makhluk di hadapan Tuhan yang Maha Esa.

Di sisi lain, keempat sila lainnya juga begitu koheren dengan esensi ajaran Islam. Dari segi isi, Pancasila yang digagas pertama kali oleh Soekarno merupakan intelektual yang melek pengetahuan agama. Dari segi hasil, keempat sila lainnya juga telah disepakati dan diterima oleh seluruh anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya terdapat ulama-ulama yang melek pengetahuan intelektual modern.

Sebagai tambahan, alinea ketiga Muqaddimah UUD 1945 juga termaktub suatu pengakuan moral para pendiri bangsa, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka tidak heran, jika Ulama Indonesia yang berjuang dengan fisik dan pemikiran untuk memerdekakan Indonesia, dengan sangat berbesar jiwa menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Bukan hanya karena koheren dengan ajaran Islam, tetapi karena Ideologi Pancasila juga dilahirkan oleh para ulama kita yang menguasai ilmu agama dan melek pengetahuan intelektual modern. Mustahil, seorang pemikir menolak dan menistakan kelahiran karya pemikirannya sendiri.

Para ulama telah ikut berjuang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditengah kebhinekaan masyarakat Indonesia. Para Ulama juga telah berkontribusi terhadap kelahiran dan finalitas Ideologi Pancasila, beserta dengan UUD 1945 sebagai konstitusi bernegara. Tugas kita untuk terus mengembangkan, atau setidaknya mempertahankan, apa yang telah diwariskan oleh para ulama.

Bahwa ajaran Islam sudah sedemikian kohesif terhadap Pancasila. Penerimaan para Ulama terhadap Pancasila bukan sekadar karena koherensi esensi ajaran Islam dengan ideologi Pancasila, tetapi lebih dari itu. Yaitu karena Pancasila juga merupakan buah pemikiran para ulama yang menjadi anggota BPUPKI selaku pendiri bangsa dan perumus Pancasila. Maka mustahil, seorang pemikir menolak hasil karya pemikirannya sendiri.

Jika memang kita menghargai para ulama sebagai pewaris Nabi, maka sudah selayaknya pula kita menghargai Pancasila yang merupakan warisan para ulama. Jangan sampai Pancasila sekadar dijadikan dispenser yang hanya didatangi ketika kita haus. Haus akan kerukunan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita tinggalkan lagi ketika kita sibuk dalam kontestasi politik. Semoga Pancasila bagaikan mata air, yang mengairi seluruhnya tanpa pandang bulu. Darinya kita meneguk teduhnya bersaudara dalam keragaman. Sebelum Pancasila dikebumikan, mari membumikan Pancasila.

Lahirnya Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran Bung Karno. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Pancasila pertama kali lahir dari buah pikirnya. Sebagai negara baru, Indonesia saat itu membutuhkan dasar filosofis yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa

dalam menjalankan "roda" yang bernama negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Diawali dengan mengemukakan apa itu kemerdekaan dan sejarah bangsa-bangsa lain yang merdeka, Bung Karno menekankan pentingnya keinginan untuk merdeka dari segenap rakyat, tanpa dibumbui dengan hal-hal yang "njlimet" sebelum menyatakan kemerdekaan. Ketika kita terlalu "bergulat" dalam menyiapkan sesuatu yang "njlimet" tersebut maka akan berakibat pada ketakutan dan ketidaksiapan untuk menjadi bangsa merdeka. Padahal, satu hal yang diperlukan dalam menyiapkan kemerdekaan bangsa adalah menemukan kesamaan pandangan, ideologi, dan latar belakang sebagai sebuah bangsa Indonesia. Merdeka adalah ketetapan hati seluruh rakyat, menjadi jiwa yang merdeka tidak hanya kemerdekaan badan.

Salah seorang pembicara pernah berkata, "Kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak sakit Malaria, banyak disentri, banyak *hongerudeem*, banyak ini dan itu, 'sehatkan dulu bangsa kita', baru kemudian merdeka".¹⁵⁰ Soekarno pun saat itu mengemukakan argumennya bahwa jika harus menyelesaikan itu semua terlebih dahulu, 20 tahun lagi pun Indonesia tak akan merdeka. Di dalam Indonesia yang merdeka-lah kita menyehatkan rakyat kita.

Pernyataan tersebut memang benar adanya, hukum internasional pun hanya mensyaratkan pembentukan negara dengan tiga unsur dasar, yaitu rakyat, bumi, dan

¹⁵⁰ Daras, Roso. TT. *Pidato Bung Karno 1 Juni 1945; Lahirnya Pancasila (ke-1)*. Dalam internet online: <http://rosodaras.wordpress.com/2010/05/29/pidato-bung-karno-1-juni-1945-lahirnya-pancasila-ke-1-2/> diunduh 17 November 2017.

pemerintah. Artinya, ketiga modal dasar itu telah dimiliki oleh Indonesia saat itu untuk menjadi negara merdeka. Adapun persoalan dasar negara bisa diatur di kemudian hari. Persoalan Indonesia merdeka didirikan atas dasar apa menjadi fokus utama dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Lagi-lagi Bung Karno belajar dari sejarah-sejarah bangsa lain yang sudah merdeka dalam merumuskan dasar negaranya. Jerman di bawah kepemimpinan Nazi-Adolf Hitler, dasar negara yang dirumuskannya tidak dalam 10 hari saja, melainkan sudah dirumuskan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Dasar negara Indonesia pun hendaknya merupakan berasal dari dalam diri Indonesia sendiri, digali dari kedalaman filosofis murni kehidupan bermasyarakat Indonesia, bukan dari ajaran luar.

Akan tetapi, kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Padahal, Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini.¹⁵¹ Ketegangan dan konflik kedaerahan kerap menghiasi berita di koran-koran dalam negeri. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila sebagai dasar negara.

Penerimaan Pancasila saat itu bukanlah serta merta diterima begitu saja sebagai dasar negara, banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum akhirnya

¹⁵¹ Kompas. *Pancasila Makin Dibutuhkan Bangsa Ini*. Surat Kabar Harian Kompas; Edisi, Minggu, 2 Juni 2013, h. 1

Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Kalangan negarawan muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi, baik secara implicit maupun eksplisit dalam sila-silanya. Kemudian pada perkembangannya, Pancasila dianggap sebagai akar dari persoalan kekisruhan bangsa ini sehingga muncul kelompok fundamentalis dan ekstremis yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara.

Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika kita melihat sejarah, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti KH. Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan ke-*rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari dan sepi dari nilai-nilai keislaman.¹⁵²

Kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan di tengah-tengah menurunnya rasa tanggung jawab dalam mengamalkan dan menjalankan Pancasila karena perasaan khawatir bahwa Pancasila bertentangan dengan nilai syariat Islam. Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Islam adalah agama *rahmah* bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan dunia.

¹⁵²Syahbana, Ali. *Pancasila dan Keluwesan Ajaran Islam*. Dalam internet online: http://www.nu.or.id/a_public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwes+Ajara+Islam-.php Diakses tanggal, 22-10-2017.

Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya. Nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila. Melalui buku ini, penulis juga melakukan kritik nalar terhadap kelompok yang selalu mengagendakan negara dengan syariat Islam.

Islam telah menjadi "spirit" Pancasila. Hal yang paling jelas memperlihatkan "spirit" Islam adalah sila pertama- "Ketuhanan Yang Maha Esa".

1. Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa

Banyak kalangan yang menghendaki agama mayoritas-Islam-menjadi dasar negara, tetapi hal itu ditentang oleh kelompok lain yang menilai bahwa ada hak-hak pemeluk agama lain yang minoritas. Sangat penting untuk mengakui bahwa ada kelompok minoritas dari kewarganegaraan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dari pembentukan Islam. Sila pertama ini menjamin hak-hak pemeluk agama lain, sejauh agama itu diakui oleh negara.¹⁵³ Membangun Indonesia merdeka bukan berdasar atas kesamaan keagamaan, tetapi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan.

Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi ataupun menyekutui-Nya. Ketuhanan Yang

¹⁵³ Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Insan Madani). h.181

Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya, dan bukan negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara. Melainkan, sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.

Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah berkah dan rahmat dari Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan tak bisa lepas dari dasar negara Indonesia. Indonesia dengan beragam pemeluk agama hendaknya bertuhan secara berkeadaban, artinya saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkannya pada pidato 1 Juni 1945: *Prinsip yang kelima hendaknya; Menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw. Orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada eogismeagama. Dan*

hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!
Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.¹⁵⁴

Pada teks pidato yang dibacakan Soekarno di depan BPUPKI ini menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila terakhir dan menempatkan sila Kebangsaan pada sila pertama. Penempatan urutan ini banyak menyimpan teka-teki bagi seluruh warga dari dulu hingga sekarang, bahkan beberapa kalangan menuduh bahwa Soekarno adalah pemikir sekuler. Bagi kalangan normatif-tekstualis, penempatan sila Ketuhanan pada urutan terakhir kurang tepat, sila Ketuhanan merupakan primakausa dari sila-sila lainnya.

Terlepas dari itu semua, Soekarno tidak bermaksud "menyepelekan" urutan dengan menempatkan sila Ketuhanan pada sila terakhir. Bila melihat penempatan sila Ketuhanan ini dari sisi kaca mata filsafat, Bung Karno memandang bahwa Ketuhanan merupakan *final cause/ultimate cause* yang menjadikan Tuhan merupakan tujuan akhir dari pengamalan dan pengabdian manusia di dunia. Mengagungkan Tuhan tidaklah harus menempatkan atau menyebut namanya di awal kalimat. Dalam ideologi Islam, menyebut nama Tuhan, baik di awal maupun di akhir tidaklah menjadi masalah bagi-Nya, karena semua arah dan tempat adalah milik-Nya. Sebagaimana bunyi firman-Nya: *Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin; dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Hadiid [57]: 3).*

¹⁵⁴Pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta.

Keselarasan sila pertama Pancasila dengan syariat Islam terlihat dalam al-Qur'an yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan, seperti dalam Surat al-Baqarah, ayat 163 yang memiliki arti; "Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa . Tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Murah, lagi Maha Penyayang".¹⁵⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa dasar kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Di dalam Islam, konsep ini biasa disebut *hablum min Allah* yang merupakan esensi dari tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah Swt.¹⁵⁶

2. Sila Kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua.

Konsep *Hablum min an-nass* (hubungan sesama manusia) dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia. Berperilaku adil dalam

¹⁵⁵Syahbana, Ali. *Pancasila dan Keluwesan Ajaran*. Dalam internet online: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwes+ajaran+Islam-.php>. Diakses tanggal, 22-10-2017.

¹⁵⁶Muttaqien, Sabilul. 2011. *Keselarasan Nilai-Nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://blog.uin-malang.ac.id/dargombes/indonesia/keselarasan-nilainilai-pancasila-dengan-ajaran-islam/index.html>. Diakses tanggal 23-10-2017.

segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, prinsip ini terlihat dalam ayat al-Qur'an surat al-Maa'idah, ayat 8 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.al-Maa'idah [5]: 8).

Seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat adil dan jujur. Keadilan dan Kejujuran adalah lawan dari dusta dan ia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Di antaranya yaitu kata "rajulun shadiq (sangat jujur)", yang lebih mendalam maknanya dari pada shadiq (jujur). Al-mushaddiq yakni orang yang membenarkan setiap ucapanmu, sedang ash-shiddiq ialah orang yang terus menerus membenarkan ucapan orang, dan bisa juga orang yang selalu membuktikan ucapannya dengan perbuatan. Di dalam al-Qur'an disebutkan (tentang ibu Nabi Isa), "Dan ibunya adalah seorang shiddiqah." (Al-Maidah: 75). Maksudnya ialah orang yang selalu berbuat jujur.

Keadilan dan Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. Seorang

pemimpin yang *sidiq* atau bahasa lainnya *honest* akan mudah diterima di hati masyarakat, sebaliknya pemimpin yang tidak jujur atau khianat akan dibenci oleh rakyatnya. Kejujuran seorang pemimpin dinilai dari perkataan dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkaatannya, dan perkataannya merupakan cerminan dari hatinya.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi *Ukhuwah Islamiyah* (persatuan sesama muslim) dan juga *Ukhuwah Insaniyah* (persatuan sebagai sesama manusia). Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras.

Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an; "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*" (Q.S. Ali Imran [3]: 103).

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. al-Hujurat [49]: 10).

4. Sila Keempat; Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah.

Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi dimana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama *syuura* (musyawarah).

Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Ali Imron, ayat 159: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imron [3]: 159).*

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka." (QS. asy-Syuura [42]: 38).

5. Sila Kelima; Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagaimana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada al-Qur'an;

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Nahl [16]: 90)

Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang harus disakralkan, ia adalah buatan

manusia yang tak lepas dari kekurangan. Pensakralan dan penyalahafsiran yang terjadi selama ini akibat keegoan masing-masing penguasa dalam usaha untuk melanggengkan kekuasaannya di bumi pertiwi. Dalam hal ini, bukan berarti Pancasila tidak relevan dengan Indonesia sekarang sehingga harus diganti demi menata kembali negara ini. Pancasila tetap sesuatu yang kontekstual selama ia diposisikan sebagai dasar negara tanpa penafsiran yang sarat kepentingan individu. Kembali untuk selalu diingat bahwa lahirnya Pancasila adalah untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama. Beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama.

Bicara tentang peran agama, sebenarnya banyak konsep yang ditawarkan. Ada yang mendefinisikan agama yang dipahami sekadar seperangkat ideologi dunia,

terdapat pula yang memahaminya sebagai seperangkat keyakinan dan ritual, bisa pula dimengerti sebagai institusi sosial, dan bahkan agama bisa diartikan sebagai sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat yang plural. Jika kita sepakat, pengertian agama yang dipahami sebagai sistem nilai, maka ia haruslah diperluas maknanya menjadi seperangkat nilai-nilai sakral yang diyakini pemeluknya akan keotentikan dan keabsolutan kebenarannya. Rupanya di Indonesia pemahaman agama yang seperti ini telah berkembang sedemikian luas dan berlangsung lama di tengah-tengah keanekaragaman religiusitas masyarakat. Ia tidak hanya ada dalam pemahaman Islam yang menjadi agama mayoritas yang tumbuh di masyarakat Indonesia, tetapi juga dalam agama Katholik, Protestan, Hindu, Buddha dan bahkan Konghucu yang semuanya juga hendak tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam agama Islam, misalnya ia dipahami sebagai seperangkat nilai akhlak yang diciptakan untuk memperbaiki perilaku kehidupan manusia. Karena itu Rasul Saw. pernah mengungkapkan bahwa beliau tidak diutus oleh Tuhan ke dunia melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Begitu juga dengan agama-agama lain, mereka juga menanamkan nilai-nilai dan etika pada pemeluknya masing-masing ke dalam berbagai jemaat dan komunitas. Hanya saja perubahan-perubahan yang terjadi di dunia global saat ini ikut pula mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja dalam kehidupan masyarakat berbangsa, tetapi juga dalam masyarakat bernegara. Pengaruh itu sedemikian besar, sehingga dapat meruntuhkan nilai-nilai kebangsaan kita. Globalisasi yang masuk dengan segenap kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi

dan informasi serta merta membawa nilai-nilai baru yang tentu saja akan menguncangkan, dalam arti membawa perubahan bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai baru itu tidak hanya bermuatan positif tetapi juga negatif yang kadangkala tidak sejalan dengan watak dan karakter bangsa Indonesia yang serba religius. Nilai-nilai negatif itu antara lain dapat ditunjukkan dengan semakin materialistiknya kehidupan ini. Orang semakin keras berlomba dan bersaing untuk mendapatkan akses ekonomi sebanyak-banyaknya, sehingga yang muncul adalah semangat keserakahan dan tidak mengenal rasa puas. Masyarakat semakin dihinggapi pikiran bahwa uang menjadi satu-satunya cara dan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Hal ini mengakibatkan lahirnya nilai-nilai dan budaya baru yang dibentuk oleh gagasan-gagasan hedonisme. Sejumlah orang menjadi lebih mengutamakan hidup untuk menyenangkan tubuhnya. Menghibur diri dengan kesenangan-kesenangan tubuh, seperti pergi ke diskotik, dugem, dan lain-lain di tengah kesederhanaan hidup mayoritas bangsa Indonesia. Memang cara-cara seperti itu di satu sisi dapat mengurangi secara tentatif tekanan hidup dan stress sosial bagi pelakunya. Namun di sisi lain akan berakibat juga terjadi ketimpangan sosial dimana-mana. Kita lihat misalnya, fenomena sosial soal pembagian zakat dan sedekah bagi fakir miskin, orang berjubel dan antri berdesak-desakkan untuk mendapatkan zakat dan sedekah yang sebenarnya nilainya tidak dapat dipakai untuk memberdayakan kehidupan sosial ekonomi orang-orang yang antri itu karena pola distribusinya yang bersifat karikatif dan tentatif.

Dalam kehidupan yang serba hedonistik seperti ini, timbullah kemudian penyakit sosial lain berupa munculnya semangat hidup yang serba individualisme. Orang lebih banyak menggunakan pertimbangan akal dan dirinya sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dimanamana individu berlomba-lomba memperebutkan keinginan pribadinya yang tidak jarang mengabaikan kepentingan publik. Kasus penanganan korupsi yang akhir-akhir ini marak di negeri kita menunjukkan sekaligus menjadi bukti nyata, betapa kepentingan pribadi telah begitu membudaya di tengah para penyelenggara negara. Padahal tugas penyelenggara negara tidak lain dan tidak bukan adalah melayani kepentingan publik. Ketika kepentingan pribadi begitu menonjol seringkali kepentingan publik menjadi dinomorduakan, sehingga anggaran negara yang semestinya dapat digunakan untuk keperluan publik yang luas tidak mencapai sasaran dan tujuan mulia. Dengan kondisi sosial yang seperti itu, terjadilah krisis di manamana di hampir semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak reformasi digulirkan pada 1998 sampai saat ini, krisis yang berkepanjangan itu pun juga belum menemukan titik terang. Untuk itu diperlukan upaya nyata, yakni bersama-sama bekerja keras melihat keadaan krisis seperti ini sekaligus mencari akar solusinya, agar di kemudian hari, karakter kebangsaan atau nasional yang diwariskan oleh para pendiri negara ini tidak hilang begitu saja ditelan perubahan-perubahan sosial dan globalisasi. Dan karakter nasional itu tercantum jelas dalam rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Kelima sila itulah yang mencerminkan karakter nasional keindonesiaan kita, mulai dari bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang mencintai tanah air, bangsa yang senang bermusyawarah untuk mengatur perbedaan pendapat dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial sebagai bentuk sikap kepedulian. Kelima karakter nasional itu jika dikonfrontasikan ke dalam realitas sosial masyarakat Indonesia kekinian, agaknya jauh dari keterkaitan ideal yang diharapkan.

Oleh karena itu diperlukan penguatan kembali dimana peran agama dapat mendorong untuk memperteguh fungsi sosial Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat membentuk karakter nasional yang diidealkan. Fungsi sosial dari Pancasila itu dapat digali dari nilai-nilai yang terdapat dalam sila-silanya itu. Namun untuk mengfungsikan secara sosial Pancasila itu diperlukan peran agama yang lebih kukuh untuk memaknai sekaligus mentransendensikan nilai-nilai Pancasila itu. Paling tidak nilai-nilai suci agama yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia itu dapat ditransformasikan ke dalam Pancasila.

Dalam hal pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, agama harus memberi warna dasarnya bagaimana kewajiban untuk mengimani Tuhan Yang Maha Esa (tauhid) bagi bangsa Indonesia itu merupakan keharusan deklaratif, bahkan keharusan dasar moral tertinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ini artinya orang yang beriman dan bermoral yang menjadi prasyarat untuk membangun manusia yang mengindonesia. Oleh karena itu, jika tidak memenuhi prasyarat religius seperti itu, dimohon untuk mengubah dirinya agar mengindonesia sebagai manusia. Begitu pula dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, agama juga mengajarkan bagaimana setiap manusia tidak hanya

mampu berbuat baik untuk diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain, sehingga menimbulkan keseimbangan dan keadaban dalam kehidupan yang bermartabat, yang dalam agama Islam disebut sebagai amal shaleh.

Dalam Sila Persatuan Indonesia, agama tidak hanya mengajarkan bagaimana ciri orang beriman itu ditunjukkan melalui kecintaannya pada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi juga kecintaan dirinya terhadap tanah air di mana ia hidup dan berkembang. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya menimbulkan semangat saling menyayangi antar sesama anak bangsa dalam suku-suku yang berbeda, tetapi juga bagaimana dalam suku-suku yang berbeda yang diciptakan oleh Tuhan itu membuat kita semakin cinta dan sadar pada sang penciptanya. Dalam Islam, kecintaan terhadap tanah air menjadi bagian dari identitas keimanan manusia.

Sementara itu dalam Sila ke-4, agama juga dapat mentransformasikan dimensi ajaran sosialnya sebagai nilai dasar dari keutamaan bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi manusia sebagai makhluk sosial. Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan agar kita diwajibkan untuk bermusyawarah dalam setiap masalah bersama yang dihadapi oleh manusia. *Wasyawirhum fil amri*, begitulah dalilnya yang diwajibkan bagi kita untuk bermusyawarah dalam semua urusan. Musyawarah dilakukan tidak hanya dengan berkumpul bersama untuk dengar pendapat, tetapi juga berdialog, berdiskusi, berinteraksi dan bahkan berdebat. Begitu pula dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, agama juga memiliki ajaran yang suci ini, agar manusia senantiasa menegakkan keadilan. Nilai-nilai keadilan ini dalam Islam juga dijunjungi tinggi. Islam tidak

hanya mengajarkan manusia bisa bersikap adil terhadap dirinya, tetapi juga terhadap orang lain. Berlaku adillah, karena keadilan itu dekat dengan dengan ketakwaan pada Tuhan, begitulah intisari ajaran kitab suci kita mengajarkan pada manusia.

Dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kelima Sila Pancasila itu sebenarnya sudah inheren dalam agama-agama yang ada di Indonesia, bahkan menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat sejak dulu. Hanya saja kini nilai-nilai transendensial itu mulai kehilangan perannya di tengah gempuran arus globalisasi yang meringsek masuk. Oleh karena itu diperlukan penguatan kembali nilai-nilai itu menjadi modal sosial (social capital) yang utama untuk membangun kembali karakter masyarakat Indonesia. Dengan bangunan karakter atau dapat disebut juga identitas sosial seperti ini, masyarakat diharapkan dapat mentransformasikan nilai-nilai yang menjadi modal sosial itu untuk kepentingan penyelenggara negara sehingga dapat menjadi karakteristik nasional yang menjiwai. Sebab hanya dengan karakteristik nasional yang seperti itulah, bangsa dan negara akan terselamatkan di tengah krisis kebangsaan yang berlarut-larut seperti saat ini.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis dialektika Islam dan Pancasila dalam uraian Bab-bab sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Ajaran agama Islam tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Karena nilai-nilai Islam sedemikian kohesif dan terserap dalam ideologi Pancasila. Seperti; Ketuhanan yang Maha Esa (QS. Al Ikhlas: 1), Kemanusiaan (QS. Al Insaan: 8-9), Nasionalisme (QS. Al Hujurat: 13), Demokrasi Musyawarah (QS. As Syuro: 38), dan Keadilan Sosial (Adz Dzaariyaay: 19).
2. Meskipun begitu, kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Padahal, Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Karena itu, kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan di tengah-tengah menurunnya rasa tanggung jawab dalam mengamalkan dan menjalankan Pancasila karena perasaan khawatir bahwa Pancasila bertentangan dengan nilai syariat Islam. Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Islam adalah agama *rahmah* bagi sekalian alam, mencintai

kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan dunia.

Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya. Nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila. Melalui buku ini, penulis juga melakukan kritik nalar terhadap kelompok yang selalu mengagendakan negara dengan syariat Islam.

Islam telah menjadi "spirit" Pancasila. Hal yang paling jelas memperlihatkan "spirit" Islam adalah sila pertama- "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila-sila lainnya dalam Pancasila.

3. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang harus disakralkan, ia adalah buatan manusia yang tak lepas dari kekurangan. Pensakralan dan penyalahafsiran yang terjadi selama ini akibat keegoan masing-masing penguasa dalam usaha untuk melanggengkan kekuasaannya di bumi pertiwi. Dalam hal ini, bukan berarti Pancasila tidak relevan dengan Indonesia sekarang sehingga harus diganti demi menata kembali negara ini. Pancasila tetap sesuatu yang kontekstual selama ia diposisikan sebagai dasar negara tanpa penafsiran yang sarat kepentingan individu. Kembali untuk selalu diingat bahwa lahirnya Pancasila adalah untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Sekali lagi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama. Beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama.

B. Saran dan Penutup

1. Kajian-kajian terkait dengan pancasila sudah cukup banyak dilakukan, meskipun begitu setidaknya karya ini bisa menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi bahan referensi untuk kajian serupa di kemudian hari.
2. Peneliti menyadari masih banyak sisi-sisi menarik dari hubungan Islam dan Pancasila yang belum dikaji yang tentunya hal itu menjadi peluang bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

Sebagai kata akhir dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan rasa puji syukur Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, maka dengan berkah itu semua peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari sisi bahasa, penulisan, pengkajian, sistematisasi, pembahasan maupun analisisnya. Maka peneliti tidak menutup diri atas segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang kesemuanya itu akan peneliti jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kelak dikemudian hari.

Akhirnya dengan memohon do'a mudah-mudahan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan peneliti khususnya, selain itu juga mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi pengembangan keilmuan Islam khususnya dalam bidang ilmu politik pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Bandung: Prenada Media: 2003)
- A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007)
- A.W.Widjaja, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997)
- Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Qāhira: Dār al Nasr, 1977)
- Abdul Wahid Khan, *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)
- Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-Baghdady al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islamy Tarbiyah, 1996)
- Abu Hamid al-Ghazāli, , *al-Iqtishad fi al-I'tiqaad*, (Mesir, Maktabah al Jundi, 1518)
- _____, *Ihya' 'Ulūm al-dīn*. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt)
- Achmad Fauzi, *et.al., Pancasila Ditinjau dari Segi Sejarah-Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, cet.III

(Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, tanpa tahun)

Adeng Muchtar Ghazali, *Civil Education* (Bandung: Benang Merah Press, 2004)

Adian Husaini (Ketua Program Doktor Pendidikan Islam – Universitas Ibn Khaldun Bogor).
<http://m.republika.co.id/berita/koran/islamia/15/09/17/nut1w616-islam-komunis-dan-pancasila>, diunduh 06 September 2017

———, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam*, (Jakarta: GIP, 2004)

Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Insan Madani., 2011)

Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, vol. ix (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991)

Al-Bukhāri, *Al-Adabul Mufrad* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990)

Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-dīn*, terj. Ibrahim Syu’aib, *Etika Agama dan Dunia*, (Bandung: Pustaka setia, 2002)

Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998)

- Budi Santoso, *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984)
- C.A. Qodir (ed), *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988)
- Daras, Roso. TT. *Pidato Bung Karno 1 Juni 1945; Lahirnya Pancasila (ke-1)*. Dalam internet online: <http://rosodaras.wordpress.com/2010/05/29/pidato-bung-karno-1-juni-1945-lahirnya-pancasila-ke-1-2/>
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz II*, (Semarang, Wicaksana, 1993)
- Didin Hafidhdhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani Press, 2003)
- E.K. Imam Munawir, *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th.)
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Fahrudin dalam
<https://www.kiblat.net/2016/04/13/ancaman-nabi-saw-terhadap-pemimpin-zalim-dan-para-pendukungnya/>

Farid Poniman, Indrawan Nugroho dan Jamil Azzaini, *Kubik Leadership* (Jakarta: Mizan Publika, 2006)

Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah, Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1991)

Gary Yulk. *Kepemimpinan dalam organisasi*. Terjemahan oleh Jusuf Udaya.. (Jakarta: Prenhallindo 1998)

Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993)

Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan: Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2012)

Hadari Nawawi dan Matin Hadari, *Kepemimpinan yang Efektif*. (Yogyakarta: Gajahmada University perss. 2004)

_____, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992)

_____, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 1993)

Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2016)

Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Hasbullāh Bakry, *Sistematika Filsafat* (Yogyakarta: PHIN, 1959)

<http://pendidikan60detik.blogspot.co.id/2016/10/kepempimpinan-sahabat-rasulullah-saw.html>

<http://www.cakrawarta.com/yusril-komunisme-akan-membuat-pancasila-hancur-lebur.html>

<http://www.mpr.go.id>, diunduh tanggal 12 September 2017.

<https://www.tongkronganislami.net/karakteristik-kepemimpinan-nabi/>

Husaini Usman, *Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008)

Husin Abdul Mu'in, (Palembang: Panitia Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia, 1957).

Hussain bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press)

Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Qāhira: Dār al-Ma'ārif, 1119)

Ibnu Abi Rabi', *Suluk al Malik fi Tadbir al Mamlik*, (Qāhira: Dār al-Sa'bi, 1980)

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, ed. Darwis al Juwaidi, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1996)

Ibnu Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah.tt)

Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz. II*
(Beirut: Darul Fikr, t.th)

Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*,
(Surabaya: Diantama, 2006)

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*; (Beirut: darKutul Ilmiyah, 1992)

Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, (Malang: Aditya Media, 2006)

Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tyebu Ireng)*, (Malang: Kalimasada , 1983)

Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*,
(Jakarta: Rineka Cipta. 2000)

Jimly Asshidiqqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi",
http://www.jimly.com/makalah/namafile/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc -, diunduh tanggal 15 September 2017.

Johnson, William C., *Public Administration : Policy, Politics, and Practice*, Brown and Benchmark, 1998.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)

Jurji Zaidan, *Tarikh at-Tamaddun al-Islami* (Turki: Dār al-Hilāl, 1958)

Jusuf Wanandi, (1998), *Good Governance dan Kaitannya Dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan : Agenda Masa Depan*, dalam *Jurnal CSIS*, Tahun XXVII. No. 3, Jakarta, 2998.

Karen Arsmtrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, (London: Harper Collins Publishers, 1997)

Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1990)

Kasman Singodimedjo, *Renungan dari Tahanan*, (Jakarta: Tintamas, 1967)

Kompas. 2013. *Pancasila Makin Dibutuhkan Bangsa Ini*. Surat Kabar Harian Kompas; Edisi, Minggu, 2 Juni 2013.

Koontz, Dkk. *Industri manajemen 2* (Assential Of Management terejemahan oleh A.Hasyim Ali) (Jakarta : Bina Aksara 1999)

Koran Jawa Pos Edisi 8 Pebruari 2008

M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)

M. Dawam Raharjo. *Pergulatan Dunia Pesantren*. (Jakarta: P3M. 1985)

M. Quthb, *Evolusi Moral*, terj. Yudian dkk (Surabaya: Ikhlas, 1995)

M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2007)

M. Yudhie R. Haryono, *Bahasa Politik al-Quran* (Bekasi: PT. Gugus Press, 2002)

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia";
<http://ariesblog.files.wordpress.com/2010/02/pendudukan-jepang-di-indonesia.ppt>, diunduh tanggal 7 April 2017.

Moch. Idhoni Anwar, *Kepemimpinan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Angkasa, 1987)

Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bratara Karya Ilmiah, 1986)

Modul Online" http://www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid=107&fname=sej204_05.htm,

Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: DDII, 2001)

Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama press. 2005)

Muhammad Abduh, *al-A'mal al-Kamilah*, (Beirut: al-Muassah, al-Arabiyah lid-Dirāsah wan-Nasyr, 1972)

Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990)

Musthafa Muslim, *Mabahith fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989)

Muttaqien, Sabilul. 2011. *Keselarasan Nilai-Nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://blog.uin-malang.ac.id/dargombes/indonesia/keselarasan-nilainilai-pancasila-dengan-ajaran-islam/index.html>

Muttaqien, Sabilul. 2011. *Keselarasan Nilai-Nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://blog.uin-malang.ac.id/dargombes/indonesia/keselarasan-nilainilai-pancasila-dengan-ajaran-islam/index.html>

Ngalim Purwanto, *Adiministrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990)

Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

_____, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Vickers, Adrian, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani, 2011)

Wahiduddin Khan, *Metode dan Syarat Kebangkitan Baru Islam*, Terj. Anding Mujahidin, (Jakarta: Rabbani Press, 2001)

Wasty Soemanto, Hedyat Soetopo, *Kepemimpinan dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

William Outh Waite, *Kamus Lengkap Pembaharuan Pemikiran Sosial Modern*, Terj. Tti Wibowo (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2000)

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 1999)

Yusuf al-Qardhawi, *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat*, terj. M. Wahid Aziz (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)

_____, *al-Maraji'ah al Ula fi al-Islam li al-Quran wa al-Sunnah* (Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.th)

Ziyad Khalil Muhammad al-Daghawain, *Manhajiyah al-Bahath fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Qahirah: al-Hadharah al-'Arabiyah, 1995)

DAFTAR INDEKS

- , 86, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94
- A**
Ad-Dihlawi, 37
Afrika, 35
Al-Fatah, 39, 40, 43, 45,
49, 54, 55, 56, 86
Al-Jisyti, 37
Allah, 38, 39, 42, 43, 46,
47, 48, 52, 54, 55, 56,
57, 60, 61, 62, 68, 69,
75, 80, 82, 85, 89, 91,
92, 94
Al-Qur'an, 36, 38, 47, 55,
78, 79, 82
Amerika Utara, 35
Amir, 34, 38, 51, 54, 59,
80, 81, 84, 85
Asar, 41
Asia Barat Daya, 35
Asia Selatan, 34, 39, 88
Asia Tenggara, 35, 40
- C**
Cina, 40
- D**
dakwah, 34, 36, 37, 38, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 69, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81,
- E**
Eropa, 35, 39
- G**
Gito Rollies, 40, 57
Gus Ron, 43, 44, 45, 48,
49, 54, 55
- H**
Haji, 37
Hanafi, 37, 51
Hijaz, 37
- I**
India, 34, 35, 37, 38, 39,
41, 45, 50, 52, 54, 56,
64, 65, 75, 83, 84, 88,
89, 90, 91, 92, 93
Indonesia, 34, 37, 38, 39,
40, 41, 45, 49, 52, 58,
59, 63, 65, 75, 86, 87,
88, 91, 93
Inggris, 35, 39, 90, 92
Islam, 34, 35, 36, 37, 40,
41, 43, 45, 46, 48, 50,
53, 54, 56, 57, 58, 61,
67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 83, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

J

Jakarta, 39, 40, 84, 91, 93
Jamaah Tabligh, 34, 37,
40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 86, 89, 90,
91, 92, 93, 94

Jisytiyyah, 37

JT, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 54, 56,
57, 65, 66, 67, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88

K

kaffah, 34, 37, 54

Kandhalawi, 34, 37

khuruj, 34, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 52, 53, 54, 55, 56,
61, 64, 65, 67, 76, 77,
81, 82, 83, 85, 94

L

Lahore, 38, 39, 50

Lampung, 40, 84

M

Madzhab Hanafi, 35

Magetan, 39, 40, 49, 56,
57, 59, 60, 64, 86

Masjid, 34, 39, 40, 45, 47,
48, 53, 54, 58, 69, 91, 94

Maturidiyyah, 37

234

Maulana, 34, 35, 36, 37,
47, 51, 54, 60, 68, 71,
75, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Maulana Yusuf, 34

Medan, 40, 84

Mewat, 34, 37

Mu'inuddin Al-Jisyti, 37

Muhammad Ilyas, 34, 35,
37, 38, 42, 50, 89, 91

Muhammad Yahya, 35, 50

Muslim, 35, 38, 39, 45, 55,
56, 57, 90, 93

N

Naqsyabandiyyah, 37

New Delhi, 37

Nizhamuddin, 38, 39, 51

P

Pakistan, 34, 36, 39, 41,
45, 50, 51, 52, 54, 56,
64, 65, 67, 83, 88, 91, 93

Q

Qaadiriyah, 37

R

Raywind, 39

Riyadhus Shalihin, 41

S

Saharnapur., 35, 50

Sahruwiyyah, 37

Sayyid Ahmad Syahid, 36

Syaikh Ahmad Sirhindi, 36

Syaikh Wali Allah, 36

Syeikh Thahawi, 38

T

tabligh, 34, 36, 38, 39, 40,
42, 45, 47, 49, 50, 53,
55, 67, 75, 79, 85

Temboro, 39, 40, 45, 49,
52, 54, 56, 57, 59, 86, 87

Z

Zamidaar, 34, 49



Laporan Hasil Penelitian Kompetitif